



Katalog BPS : 2303003.94

PROFIL KETENAGAKERJAAN PROVINSI PAPUA

Labour Profile of Papua Province

2012



<http://papua.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA

**PROFIL KETENAGAKERJAAN
PROVINSI PAPUA
2012**

<http://papua.go.id>

PROFIL KETENAGAKERJAAN PROVINSI PAPUA 2012

ISBN : -
No Publikasi : 94000.1310
Katalog BPS : 2303003.94
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : *ix + 70 halaman*

Naskah :
Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua setiap tahunnya membuat Profil Ketenagakerjaan Provinsi Papua, pada tahun ini profil dibuat berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2012. Profil ketenagakerjaan ini berisi informasi seputar keadaan tenaga kerja di Provinsi Papua.

Penerbitan publikasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran fenomena sosial terutama di bidang tenaga kerja yang sedang terjadi dan gambaran tentang capaian tahap pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mengoreksi dan memberi perhatian sehingga publikasi ini bisa terwujud dengan segala keterbatasan dan kekurangannya.

Saran dan masukan sangat diharapkan guna mendukung, membantu dan menyempurnakan publikasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Besar harapan kami semoga buku ini bermanfaat untuk semua, terima kasih.

Jayapura, Agustus 2013
Kepala BPS Provinsi Papua



Ir. Didik Koesbianto, M.Si
NIP.19650809 198702 1 001

ORGANISASI PENULISAN

Penanggung Jawab

Ir. Didik Koesbianto, M.Si

Editor

Suntono, SE, M.Si

Penulis dan Pengolah Data

Ika Rusinta W, S.ST

Layout

Ika Rusinta W, S.ST

Desain Cover

M. Tobroni, S.ST

<http://papua.bps.go.id>

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Organisasi Penulisan	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
Bab II Konsep dan Definisi	5
Bab III Penduduk Usia Kerja	15
3.1 Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	15
3.2 Penduduk Usia Kerja menurut Kabupaten/Kota	17
3.3 Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Utama	18
Bab IV Penduduk Angkatan Kerja	21
4.1 Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	21
4.2 Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota	22
4.3 Angkatan Kerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan	24
Bab V Penduduk Bekerja	29
5.1 Penduduk Bekerja menurut Kelompok Umur	29
5.2 Penduduk Bekerja menurut Kabupaten/Kota	31
5.3 Penduduk Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan ..	34
5.4 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha	36

5.5	Penduduk Bekerja menurut Jam Kerja	42
5.6	Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan	44
5.7	Penduduk Bekerja menurut Sektor Formal Informal	48
Bab VI Pengangguran		51
6.1	Pengangguran menurut Kelompok Umur.....	51
6.2	Pengangguran menurut Kabupaten/Kota	52
6.3	Pengangguran menurut Kegiatannya	54
6.4	Pengangguran menurut Tingkat Pendidikan	55
6.5	Setengah Pengangguran	56
Bab VII Indikator Ketenagakerjaan.....		59
7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	59
7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	61
7.3	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	63
7.4	Perkembangan Indikator Tenaga Kerja	65
7.5	Penduduk Bukan Angkatan Kerja	66
Bab VIII Kesimpulan.....		69

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Penduduk Usia Kerja menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Papua Tahun 2012	16
Tabel 3.2	Penduduk Usia Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012	17
Tabel 3.3	Penduduk Usia Kerja menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012	20
Tabel 4.1	Penduduk Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012	23
Tabel 4.2	Penduduk Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2012.....	26
Tabel 5.1	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012.....	32
Tabel 5.2	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2012	35
Tabel 5.3	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Papua Tahun 2012.....	37
Tabel 5.4	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Papua Tahun 2012.....	38
Tabel 5.5	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2012	41
Tabel 5.6	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2012.....	42

Tabel 5.7	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jumlah Jam Kerja di Provinsi Papua Tahun 2012.....	44
Tabel 6.1	Pengangguran menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012.....	53
Tabel 6.2	Pengangguran menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012.....	54
Tabel 7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012.....	60
Tabel 7.2	Tingkat Pangangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012.....	62
Tabel 7.3	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012.....	64
Tabel 7.4	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tahun 2012.....	65
Tabel 7.5	Penduduk Bukan Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan di Provinsi Papua Tahun 2012.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Ketenagakerjaan Sakernas.....	5
Gambar 3.1	Persentase Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Utama di Provinsi Papua Tahun 2012.....	19
Gambar 4.1	Penduduk Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua Tahun 2012.....	22
Gambar 4.2	Persentase Penduduk Angkatan Kerja menurut Topografi dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012.....	24
Gambar 4.3	Penduduk Angkatan Kerja menurut Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2012.....	25
Gambar 5.1	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua Tahun 2012.....	30
Gambar 5.2	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua Tahun 2012.....	31
Gambar 5.3	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Topografi di Provinsi Papua Tahun 2012.....	33
Gambar 5.4	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2012.....	34
Gambar 5.5	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan usaha dan Topografi di Provinsi Papua Tahun 2012.....	40
Gambar 5.6	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jam Kerja di Provinsi Papua Tahun 2012.....	43

Gambar 5.7	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012.....	45
Gambar 5.8	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Topografi di Provinsi Papua Tahun 2012	46
Gambar 5.9	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2012.....	47
Gambar 5.10	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012	48
Gambar 5.11	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status dan Topografi di Provinsi Papua Tahun 2012	49
Gambar 6.1	Pengangguran menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012	52
Gambar 6.2	Pengangguran menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2012	56
Gambar 6.3	Setengah Penganggur Terpaksa menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012	57
Gambar 6.4	Setengah Penganggur Terpaksa menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2012.....	58
Gambar 7.1	TPAK menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012.....	60



BAB I.
PENDAHULUAN

<http://paperkit.net>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketenagakerjaan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian suatu wilayah. Jumlah angkatan kerja, penduduk yang bekerja, angka pengangguran merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketenagakerjaan adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, dan sebaliknya semakin banyak tenaga kerja yang terserap maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, strategi/perencanaan di bidang ketenagakerjaan mutlak diperlukan. Oleh karena itu, data yang terkait dengan ketenagakerjaan perlu disediakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi.

Badan Pusat Statistik sebagai instansi penyedia data berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Data ketenagakerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Sebelum tahun 2011 SAKERNAS dilaksanakan 2 kali setahun, namun mulai tahun 2011 dilaksanakan 4 kali setahun (4 triwulan). Secara umum SAKERNAS yang dilaksanakan setiap triwulan dapat digunakan untuk mengestimasi keadaan tenaga kerja sampai level provinsi. Sementara itu, khusus untuk triwulan III (Agustus) dapat menyajikan data sampai level kabupaten/kota.

Data ketenagakerjaan diperoleh dari SAKERNAS. Mulai tahun 2011, SAKERNAS dilaksanakan 4 kali setahun.

Melalui survei ini dapat diperoleh gambaran umum ketenagakerjaan seperti jumlah tenaga kerja yang tersedia, jumlah pengangguran, tingkat penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha, dan status pekerjaan dari penduduk yang bekerja. Selain itu, indikator-indikator penting ketenagakerjaan seperti Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga dapat diketahui.

Provinsi Papua yang terdiri dari 29 kabupaten/kota mempunyai permasalahan ketenagakerjaan yang terbilang kompleks. Jika dilihat dari segi kuantitas, jumlah angkatan kerja maupun penduduk yang bekerja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 jumlah angkatan kerja sebanyak 1.510.176 meningkat menjadi 1.536.728 pada

Tingkat Pengangguran di Provinsi Papua tergolong rendah, bahkan lebih rendah dibanding angka nasional.

tahun 2011. Di sisi lain, pada periode yang sama angka pengangguran mengalami kenaikan dari 3,55 persen menjadi 3,94 persen. Walaupun demikian, tingkat pengangguran di Papua masih tergolong rendah dan bahkan lebih rendah dibanding angka nasional (6,56 persen). Kondisi ini semestinya menjadi kondisi ideal untuk dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, yang selanjutnya dapat menurunkan angka kemiskinan. Namun, kenyataan yang terjadi bukanlah demikian. Walaupun angka pengangguran terbilang rendah dan angkatan kerja yang tersedia juga melimpah, tidak serta merta berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Di tingkat nasional, Papua masih menjadi *top score* provinsi dengan persentase penduduk miskin terbanyak, yaitu sebesar 31,24 persen (kondisi September 2011).

Permasalahan mendasar ketenagakerjaan di Papua adalah rendahnya kualitas tenaga kerja.

Permasalahan mendasar yang dihadapi Papua di bidang ketenagakerjaan adalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Dengan minim pendidikan dan keahlian, jenis pekerjaan yang dilakukan pun adalah yang tidak membutuhkan *skill* tinggi, seperti bertani. Dampaknya pendapatan yang diterima juga relatif kecil. Hal inilah yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Papua.

Publikasi ini rutin disusun setiap tahun untuk memberikan gambaran mengenai kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Papua

khususnya pada tahun 2012. Selain itu, dalam publikasi ini juga memuat penjelasan, konsep dan definisi tentang istilah-istilah ketenagakerjaan, sehingga pembaca dapat lebih memahami data dan informasi yang disajikan.

1.2 Ruang Lingkup

Publikasi Profil Ketenagakerjaan di Provinsi Papua 2012 ini disusun dari data SAKERNAS bulan Agustus 2012. Pembahasan dibatasi hanya sampai tingkat kabupaten/kota, mengingat kecukupan jumlah sampel hanya untuk estimasi sampai level kabupaten/kota. Di beberapa kabupaten tidak dapat dilakukan estimasi karena syarat kecukupan sampel tidak terpenuhi (pemasukan dokumen rendah). Sebagai contoh, pada Kabupaten Pegunungan Bintang tidak dapat dikeluarkan indikator ketenagakerjaan karena sampel tidak cukup untuk estimasi.

*Pembahasan
dibatasi sampai
tingkat
kabupaten/kota
di Provinsi Papua*

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum publikasi ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- Mengetahui komposisi penduduk usia kerja dirinci menurut jenis kelamin, jenis kegiatan, dan kelompok umur;
- Mengetahui karakteristik angkatan kerja menurut jenis kelamin, pendidikan, kelompok umur;
- Mengetahui karakteristik penduduk yang bekerja menurut jenis kelamin, pendidikan, kelompok umur, lapangan usaha, status pekerjaan, jam kerja, dan sektor formal/informal;
- Mengetahui karakteristik pengangguran menurut jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan, dan jenis kegiatan;
- Mengetahui indikator ketenagakerjaan di setiap kabupaten/kota.

1.4 Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri dari delapan bab, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab I. Berisi tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II. Berisi Konsep dan Definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan.

Bab III. Membahas tentang karakteristik penduduk usia kerja yang dirinci menurut jenis kelamin, kelompok umur, kabupaten/kota, dan kegiatan terbanyak selama seminggu yang lalu.

Bab IV. Berisi tentang karakteristik angkatan kerja, termasuk di dalamnya bukan angkatan kerja yang dirinci menurut jenis kelamin, kelompok umur, kabupaten/kota, dan pendidikan.

Bab V. Menjelaskan tentang kondisi penduduk yang bekerja yang dirinci menurut jenis kelamin, pendidikan, kelompok umur, lapangan usaha, status pekerjaan, jumlah jam kerja, dan kabupaten/kota.

Bab VI. Berisi karakteristik pengangguran menurut jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan, dan kabupaten/kota.

Bab VII. Membahas tentang perkembangan dari beberapa indikator ketenagakerjaan, meliputi: TPAK, TPT, dan TKK.

Bab VIII. Kesimpulan

An orange scroll banner with a gradient and rounded corners, featuring a shadow effect. The text is centered on the banner.

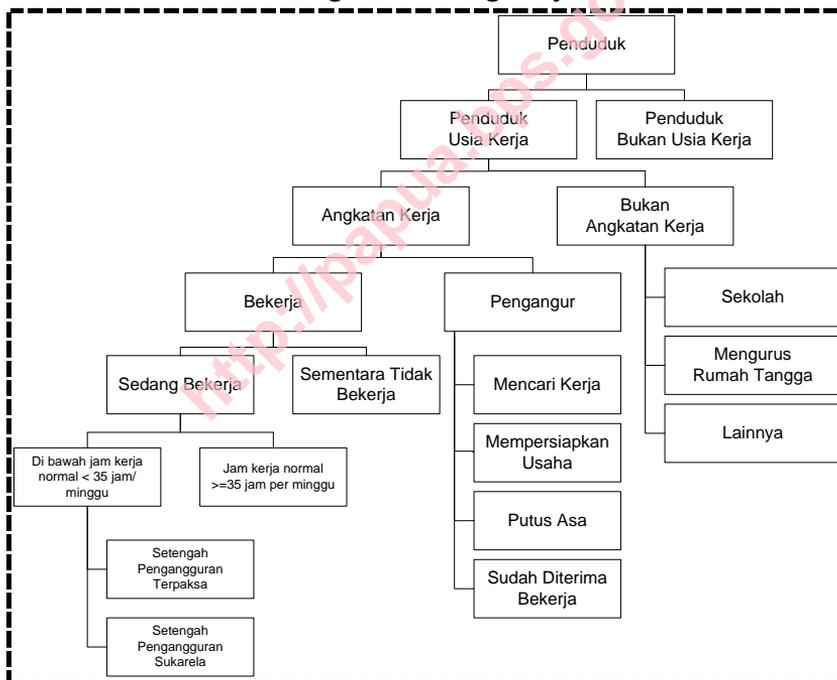
BAB II. KONSEP & DEFINISI

<http://paperkit.net>

BAB II KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik adalah *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization (ILO)*. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Konsep tersebut dapat digambarkan oleh diagram ketenagakerjaan berikut:

Gambar 2.1. Diagram Ketenagakerjaan Sakernas



Definisi yang berkaitan dengan penerapan konsep tersebut di Indonesia dijelaskan dalam uraian berikut:

2.1 Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.

2.2 Penduduk Angkatan Kerja

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

2.3 Penduduk Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dan sebagainya, termasuk mereka yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja. Mulai tahun 2011 ini, mereka yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja dikategorikan sebagai pengangguran (sesuai konsep ILO, hal. 97 "*An ILO Manual on Concepts and Methods*").

Contoh:

- a. Pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak masuk bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya.
- b. Petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya

(menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah).

- c. Orang-orang yang bekerja atas tanggungan/resikonya sendiri dalam suatu bidang keahlian, yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pesanan dan sebagainya. **Misalnya:** dalang, tukang cukur, tukang pijat, dan sebagainya.

Klasifikasi Formal–Informal,

Beberapa pihak, mendefinisikan kegiatan informal hanya berdasarkan status pekerjaan, namun dalam publikasi ini, pendekatan batasan kegiatan informal diambil dari kombinasi antara jenis pekerjaan utama dan status pekerjaan. Batas kegiatan informal dapat dilihat seperti pada bagan berikut :

Batasan Kegiatan Informal

Status Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Utama									
	Tenaga Profesional	Tenaga Kepemimpinan	Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha	Tenaga Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Pertanian	Tenaga Produksi	Tenaga Operasional	Pekerja Kasar	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Berusaha Sendiri	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tak Dibayar	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>INF</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>INF</i>
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>
Buruh/Karyawan/Pegawai	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>
Pekerja Bebas di Pertanian	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>
Pekerja Bebas di Non Pertanian	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>
Pekerja Tak Dibayar	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>

Note : F = Formal

INF=Informal

2.4 Penduduk Pengangguran

Penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

(lihat pada *“An ILO Manual on Concepts and Methods”*)

Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka :

- a. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
- b. Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan. Mereka yang sedang bekerja atau yang sedang dibebaskan tugas, baik akan dipanggil kembali ataupun tidak, dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang **“baru”**, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila

“tindakannya nyata”, seperti : mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/ tempat, mengurus surat ijin usaha, dan sebagainya, telah/sedang dilakukan.

Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha.

Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Penjelasan :

Kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha.

Setengah Penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah Penganggur terdiri dari:

- a. **Setengah Penganggur Terpaksa** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- b. **Setengah Penganggur Sukarela** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutkan sebagai pekerja paruh waktu/*part time worker*).

2.5 Penduduk Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun atau lebih yang tidak termasuk Angkatan Kerja yang dibedakan

menurut jenis kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak antara lain sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya.

- a. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan.
- b. **Mengurus rumah tangga** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya: ibu-ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu mengurus rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapatkan upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.
- c. **Kegiatan lainnya** adalah kegiatan seseorang selain disebut di atas, yakni mereka yang sudah pensiun, orang-orang yang cacat jasmani (buta, bisu dan sebagainya) yang tidak melakukan sesuatu pekerjaan seminggu yang lalu.

2.6 Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).

2.7 Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah jumlah jam kerja yang dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.

Bagi pedagang keliling, jumlah jam kerja dihitung mulai berangkat dari rumah sampai tiba kembali di rumah dikurangi waktu yang tidak merupakan jam kerja, seperti mampir ke rumah famili/kawan, dan sebagainya.

2.8 Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja.

2.9 Jenis pekerjaan/jabatan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan pada publikasi 2009 ini mengikuti KBJI (Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia) 2002 yang mengacu pada ISCO 88.

Upah/gaji bersih adalah penerimaan buruh/karyawan berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan tersebut. Penerimaan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Penerimaan bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan, dan sebagainya oleh perusahaan/kantor/majikan.

2.10 Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu :

- a. **Berusaha sendiri**, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
- b. **Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar**, adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
- c. **Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar**, adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
- d. **Buruh/Karyawan/Pegawai**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan

sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.

- e. **Pekerja bebas di pertanian**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi : pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian. **Majikan** adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati.
- f. **Pekerja bebas di non pertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi : usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/ bangunan, perdagangan, angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan. Huruf e dan f yang dikembangkan mulai pada publikasi 2001, pada tahun 2000 dan sebelumnya dikategorikan pada huruf d dan a (huruf e termasuk dalam d dan huruf f termasuk dalam a).
- g. **Pekerja tak dibayar** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari :

- Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak yang membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah.
- Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti famili yang membantu melayani penjualan di warung.

Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya.

<http://papua.bps.go.id>

BAB III.

PENDUDUK USIA KERJA

<http://papua.bps.go.id>

BAB III

PENDUDUK USIA KERJA

3.1 Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Dalam istilah ketenagakerjaan, penduduk usia kerja biasa disebut sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja adalah bagian dari penduduk yang dari sisi usia dipandang telah mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Banyaknya tenaga kerja menyimpan potensi ekonomi yang dimiliki suatu wilayah. Mereka yang berpartisipasi aktif dalam pasar kerja biasa disebut dengan angkatan kerja. Sementara itu mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lain tergolong sebagai bukan angkatan kerja. Batasan umur yang digunakan Indonesia dalam mengelompokkan penduduk usia kerja mengacu pada konsep *International Labour Organization (ILO)*, yaitu 15 tahun ke atas. Sedangkan penduduk yang berusia di bawah 15 tahun digolongkan sebagai penduduk bukan usia kerja.

Jumlah penduduk usia kerja di Papua tahun 2012 sebesar 2.009.145 orang

Pada tahun 2012, jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Papua mencapai 2.009.145 orang. Sekitar 82,59 persennya didominasi oleh penduduk usia muda (15 sampai 44 tahun). Sementara sisanya 17,41 persen merupakan penduduk berumur 45 tahun ke atas. *Supply* tenaga muda yang besar ini menjadi potensi yang luar biasa jika diiringi juga dengan peningkatan kualitas berupa keahlian dan

keterampilan.

Penduduk usia kerja laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

Secara umum persentase penduduk usia kerja laki-laki (52,88 persen) lebih banyak dibanding perempuan (47,12 persen). Hal ini sejalan dengan rasio jenis kelamin di Papua yang memang di atas 100, yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Jika dilihat dari

kelompok umur, persentase terbesar penduduk usia kerja ada pada kelompok umur 15-19 tahun yang mencapai 16,52 persen.

Tabel 3.1 Penduduk Usia Kerja menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Papua Tahun 2012

Kel Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	% Penduduk Usia Kerja		% Kel Umur
	L	P		L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15-19	183.589	148.376	331.965	55,30	44,70	16,52
20-24	119.319	131.923	251.242	47,49	52,51	12,50
25-29	131.828	150.073	281.901	46,76	53,24	14,03
30-34	166.381	153.158	319.539	52,07	47,93	15,90
35-39	137.363	125.270	262.633	52,30	47,70	13,07
40-44	118.399	93.739	212.138	55,81	44,19	10,56
45-49	83.297	59.122	142.419	58,49	41,51	7,09
50-54	56.871	39.993	96.864	58,71	41,29	4,82
55-59	27.826	20.036	47.862	58,14	41,86	2,38
60+	37.484	25.098	62.582	59,90	40,10	3,11
Jumlah	1.062.357	946.788	2.009.145	52,88	47,12	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2012

Dominannya penduduk usia muda merupakan sebuah keuntungan sekaligus menjadi *big opportunity* bagi pembangunan ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu perlu diperhatikan mengenai pendidikan dan keterampilannya, sehingga bukan hanya dominan dalam hal jumlah namun juga dalam kualitas. Kualitas tenaga kerja inilah yang menjadi point penting dalam meningkatkan produktivitas kerja yang akan berdampak pada kemajuan ekonomi. Usaha ini dapat dilakukan antara lain dengan membekali mereka dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai dan sesuai dengan dunia usaha yang membutuhkan.

3.2 Penduduk Usia Kerja menurut Kabupaten/Kota

Jumlah penduduk usia kerja umumnya akan sebanding dengan jumlah penduduknya. Sebaran jumlah penduduk usia kerja menurut kabupaten/kota tahun 2012 secara lengkap (kecuali pada Kabupaten Pegunungan Bintang tidak tersedia datanya karena tidak memenuhi minimal sampel untuk estimasi) tersaji pada Tabel 3.2 berikut. Jumlah penduduk usia kerja paling tinggi berada di Kota Jayapura yaitu sebanyak 192.784 orang atau sekitar 9,6 persen penduduk usia kerja di Papua. Sedangkan kabupaten dengan jumlah penduduk usia kerja paling sedikit adalah Kabupaten Supiori sebanyak 10.226 orang atau sekitar 0,51 persen dari seluruh jumlah penduduk usia kerja di Papua.

Penduduk usia kerja paling banyak terdapat di Kota Jayapura dan terendah di Kabupaten Supiori.

Jika ditinjau menurut jenis kelaminnya, penduduk usia kerja laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Hal ini terjadi hampir di semua kabupaten/kota, kecuali Kabupaten Dogiyai yang mempunyai penduduk usia kerja perempuan (50,25 persen) lebih banyak dibanding laki-laki (49,75 persen).

Tabel 3.2 Penduduk Usia Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total	%
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9401. Merauke	75.221	67.407	142.628	7,10
9402. Jayawijaya	77.413	74.226	151.639	7,55
9403. Jayapura	43.595	38.041	81.636	4,06
9404. Nabire	51.519	44.389	95.908	4,77
9408. Yapen Waropen	28.983	27.718	56.701	2,82
9409. Biak Numfor	45.288	43.329	88.617	4,41
9410. Paniai	58.647	54.490	113.137	5,63
9411. Puncak Jaya	43.237	37.136	80.373	4,00
9412. Mimika	77.044	55.803	132.847	6,61

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total	%
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9413. Boven Digoel	22.250	17.314	39.564	1,97
9414. Mappi	27.994	25.386	53.380	2,66
9415. Asmat	26.004	23.828	49.832	2,48
9416. Yahukimo	62.034	56.408	118.442	5,90
9417. Pegunungan Bintang	n.a	n.a	n.a	n.a
9418. Tolikara	44.247	39.225	83.472	4,15
9419. Sarmi	13.665	10.489	24.154	1,20
9420. Keerom	20.846	16.139	36.985	1,84
9426. Waropen	9.165	8.218	17.383	0,87
9427. Supiori	5.395	4.831	10.226	0,51
9428. Mamberamo Raya	6.404	5.593	11.997	0,60
9429. Nduga	28.437	24.840	53.277	2,65
9430. Lanny Jaya	55.817	50.955	106.772	5,31
9431. Mamberamo Tengah	14.945	13.562	28.507	1,42
9432. Yalimo	20.300	18.067	38.367	1,91
9433. Puncak	35.464	32.555	68.019	3,39
9434. Dogiyai	29.163	29.458	58.621	2,92
9435. Intan Jaya	15.207	14.155	29.362	1,46
9436. Deiyai	22.629	21.886	44.515	2,22
9471. Kota Jayapura	101.444	91.340	192.784	9,60
Jumlah	1.062.357	946.788	2.009.145	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2012

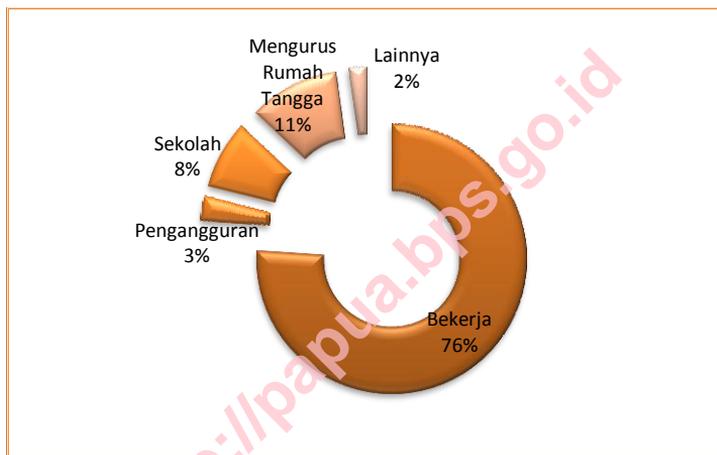
3.3 Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Utama

Berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan, penduduk usia kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang aktif secara ekonomi dalam pasar kerja. Sementara bukan angkatan kerja adalah mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lainnya.

Konsep ini mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, kondisi secara umum yang terjadi di Indonesia termasuk Papua adalah banyak ditemukan adanya pekerja anak (15 tahun ke bawah). Meskipun mereka aktif secara ekonomi, namun mereka tidak digolongkan sebagai angkatan kerja karena tidak memenuhi konsep batasan umur penduduk

usia kerja. Kedua, masih menganut azas eksklusifitas di mana seorang penduduk hanya dapat digolongkan dalam satu kategori. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Mereka hanya dapat dimasukkan dalam salah satu kategori, bekerja atau sekolah. Meskipun pada kenyataannya mereka melakukan kedua kegiatan tersebut.

Gambar 3.1 Persentase Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Utama di Provinsi Papua Tahun 2012



Sumber: Sakernas, Agustus 2012

Berdasarkan gambar 3.1 di atas, diketahui bahwa kegiatan utama sebagian besar penduduk Papua yang berusia 15 tahun ke atas adalah bekerja (76 persen). Sementara itu, persentase penduduk yang menganggur sebanyak 3 persen. Selanjutnya sebanyak 21 persen penduduk usia kerja tidak terlibat secara aktif dalam perekonomian, yaitu mereka yang mengurus rumah tangga, sekolah, dan melakukan kegiatan lainnya masing-masing sebesar 11 persen, 8 persen, dan 2 persen.

Salah satu ukuran kualitas penduduk usia kerja dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Lebih dari setengah penduduk usia kerja masih berpendidikan rendah. Ada sebanyak 42,03 persen penduduk usia kerja adalah mereka yang belum tamat SD atau bahkan belum pernah

bersekolah, selanjutnya sebanyak 16,54 persen berpendidikan SD. Sementara itu, penduduk usia kerja yang berpendidikan tinggi (Diploma/Sarjana) hanya 5,69 persen.

Sejalan dengan hal itu, jika dilihat menurut jenis kelaminnya, persentase perempuan usia kerja yang berpendidikan di bawah SD (48,33 persen) lebih tinggi dibanding laki-laki (36,42 persen). Namun sebaliknya untuk pendidikan SD ke atas secara persentase perempuan kalah dibanding laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa di Papua secara umum laki-laki mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dibanding perempuan.

- *Sebagian besar penduduk usia kerja berpendidikan sangat rendah*
- *Tingkat pendidikan perempuan relatif lebih rendah dibanding laki-laki*

Tabel 3.3 Penduduk Usia Kerja menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
di bawah SD	386.872	457.579	844.451
<i>(persentase)</i>	36,42	48,33	42,03
SD	182.325	149.922	332.247
<i>(persentase)</i>	17,16	15,83	16,54
SLTP	178.686	133.936	312.622
<i>(persentase)</i>	16,82	14,15	15,56
SLTA	249.066	156.456	405.522
<i>(persentase)</i>	23,44	16,52	20,18
PT	65.408	48.895	114.303
<i>(persentase)</i>	6,16	5,16	5,69
Total	1.062.357	946.788	2.009.145
<i>(persentase)</i>	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2012

An orange scroll graphic with a gradient from light to dark orange, featuring a shadow and a rolled-up edge effect on the left and right sides. The text is centered on the scroll.

BAB IV.
PENDUDUK ANGKATAN
KERJA

<http://pabubis.go.id>

BAB IV

PENDUDUK ANGKATAN KERJA

4.1 Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Jumlah penduduk angkatan kerja menggambarkan jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam perekonomian. Aktif di sini berarti bahwa mereka berusaha untuk menghasilkan/memproduksi barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari penduduk bekerja dan pengangguran. Pengangguran tetap digolongkan ke dalam angkatan kerja karena meskipun mereka belum menghasilkan pendapatan, namun mereka berusaha mendapatkan pekerjaan.

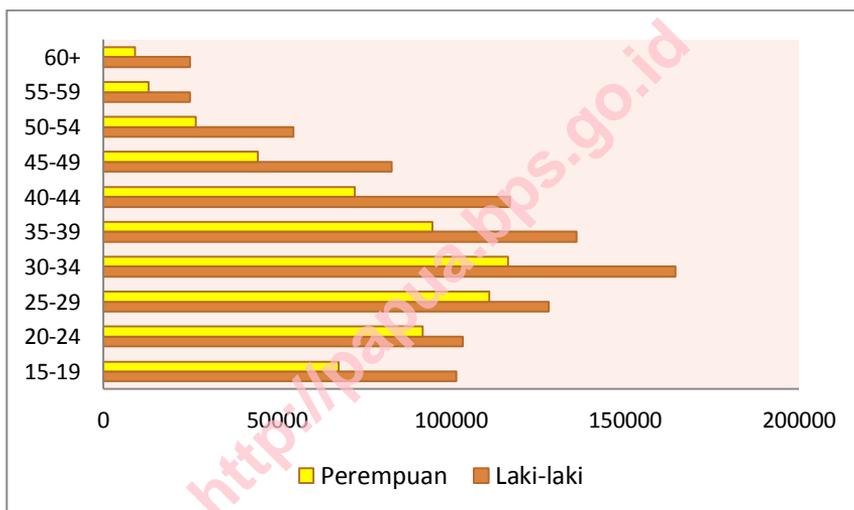
Pada tahun 2012, jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua mencapai 1.585.434 orang. Hampir 60 persen dari jumlah tersebut berjenis kelamin laki-laki, sementara sisanya 40 persen adalah perempuan. Tidak dapat dipungkiri walaupun jumlah penduduk usia kerja antara laki-laki dan perempuan secara jumlah tidak terpaut jauh, namun kenyataannya laki-laki lebih banyak terlibat secara aktif dalam ekonomi dibanding perempuan. Sekitar 22,19 persen perempuan yang termasuk usia kerja lebih memilih mengurus rumah tangga daripada terlibat secara aktif dalam perekonomian.

- *Jumlah angkatan kerja di Papua tahun 2012 adalah 1.585.434 orang.*
- *Angkatan kerja paling banyak terdapat pada kelompok umur 30-34 tahun.*

Umur akan sangat mempengaruhi penduduk apakah mereka akan masuk ke dalam pasar kerja atau tidak. Pada kelompok usia muda (15-19 tahun), sebagian besar penduduk cenderung memilih sekolah daripada bekerja atau mencari kerja. Dengan semakin meningkatnya umur, maka makin banyak penduduk yang aktif dalam perekonomian, sampai mencapai puncaknya pada usia 30an. Dan

selanjutnya jumlah angkatan kerja akan kembali menurun seiring dengan banyaknya penduduk yang meninggalkan pasar kerja karena telah memasuki masa pensiun atau telah berhenti bekerja. Gambaran mengenai jumlah penduduk angkatan kerja yang dirinci berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur tersaji pada Gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1 Penduduk Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua Tahun 2012



Sumber: Sakernas, Agustus 2012

4.2 Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota

Sebaran angkatan kerja menurut kabupaten/kota di Papua tidak tergantung pada jumlah penduduk usia kerjanya, meskipun secara umum berlaku demikian. Jumlah penduduk usia kerja yang unggul secara kuantitas, seperti di Kota Jayapura tidak serta merta memiliki jumlah angkatan kerja yang besar pula. Tabel 4.1 di bawah menyajikan jumlah angkatan kerja per kabupaten/kota pada tahun 2012.

Angkatan kerja paling tinggi terdapat di Kabupaten Jayawijaya yaitu sebanyak 130.594 orang. Menyusul berikutnya adalah Kota Jayapura dengan angkatan kerja sebanyak 116.394 orang.

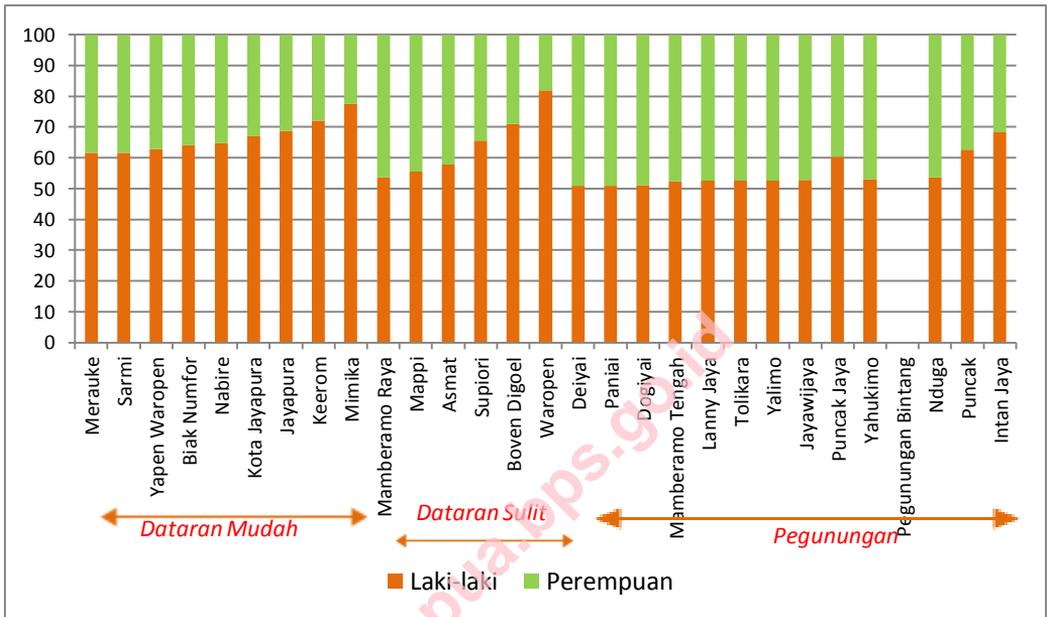
Sedangkan Kabupaten Supiori mempunyai jumlah angkatan kerja paling kecil yaitu sebesar 6.446 orang.

Tabel 4.1 Penduduk Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
9401. Merauke	64.459	40.167	104.626
9402. Jayawijaya	68.851	61.743	130.594
9403. Jayapura	36.396	16.534	52.930
9404. Nabire	44.183	23.979	68.162
9408. Yapen Waropen	23.035	13.618	36.653
9409. Biak Numfor	36.722	20.613	57.335
9410. Paniai	55.493	53.613	109.106
9411. Puncak Jaya	35.466	23.361	58.827
9412. Mimika	66.238	19.180	85.418
9413. Boven Digoel	19.818	8.097	27.915
9414. Mappi	26.054	20.893	46.947
9415. Asmat	24.720	18.072	42.792
9416. Yahukimo	60.909	54.178	115.087
9417. Pegunungan Bintang	n.a	n.a	n.a
9418. Tolikara	36.645	32.911	69.556
9419. Sarmi	11.574	7.191	18.765
9420. Keerom	17.716	6.880	24.596
9426. Waropen	7.668	1.681	9.349
9427. Supiori	4.227	2.219	6.446
9428. Mamberamo Raya	5.764	4.983	10.747
9429. Nduga	28.437	24.627	53.064
9430. Lanny Jaya	55.696	50.225	105.921
9431. Mamberamo Tengah	14.945	13.562	28.507
9432. Yalimo	19.859	17.825	37.684
9433. Puncak	31.808	19.009	50.817
9434. Dogiyai	27.559	26.258	53.817
9435. Intan Jaya	13.999	6.465	20.464
9436. Deiyai	21.866	21.049	42.915
9471. Kota Jayapura	78.069	38.325	116.394
Jumlah	938.176	647.258	1.585.434

Sumber: Sakernas, Agustus 2012

Gambar 4.2 Persentase Penduduk Angkatan Kerja menurut Topografi dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012



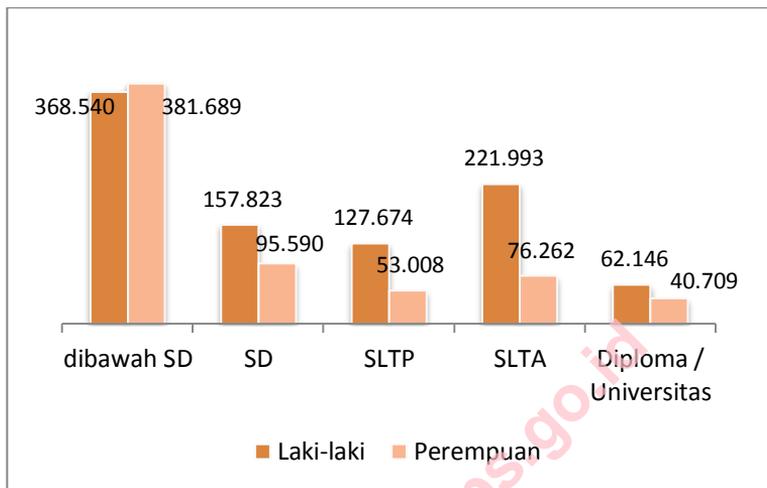
Sumber: Sakernas, Agustus 2012

Jumlah angkatan kerja menurut jenis kelamin pada masing-masing kabupaten/kota bervariasi dan tergantung pada topografi wilayahnya. Kabupaten/kota yang termasuk dataran mudah, jumlah angkatan kerja laki-laki lebih mendominasi dibanding perempuan, minimum perbandingannya adalah 6 dibanding 4. Begitu pula untuk kabupaten dataran sulit, laki-laki masih mendominasi angkatan kerja. Sementara itu, di daerah pegunungan jumlah angkatan kerja hampir sepadan/sama antara laki-laki dan perempuan.

4.3 Angkatan Kerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Kualitas tenaga kerja suatu daerah dapat diukur salah satunya dengan melihat tingkat pendidikannya. Gambaran mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja di Papua terdapat pada Gambar 4.3 berikut.

Gambar 4.3 Penduduk Angkatan Kerja menurut Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2012



Sumber: Sakernas, Agustus 2012

Secara umum kualitas angkatan kerja di Papua masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari sebagian besar angkatan kerja di Papua masih memiliki pendidikan lebih rendah dari SD. Persentase angkatan kerja yang tidak tamat SD atau bahkan yang belum pernah sekolah ada sebanyak 47,32 persen. Di sisi lain mereka yang berpendidikan tinggi (Diploma/Universitas) hanya sekitar 6,49 persen.

Selain itu, ketimpangan gender dalam hal pendidikan juga masih terlihat. Dari gambar di atas kita dapat melihat bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Pada level pendidikan di bawah SD terlihat bahwa dari sisi jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Namun, semakin tinggi level pendidikan, ternyata laki-laki lebih beruntung dalam mengenyam pendidikan dibanding perempuan. Sebagai contoh pada level pendidikan SLTA, persentase laki-laki adalah sebanyak 74,43 persen, sedangkan perempuan hanya 25,57 persen. Potret keadaan pendidikan angkatan kerja ini hendaknya dapat menjadi acuan dalam penentuan kebijakan dalam bidang pendidikan terutama bagi perempuan.

Tabel 4.2 Penduduk Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Pendidikan yang Ditamatkan				Jumlah
	< SD	SD	SLTP	SLTA+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9401. Merauke	21.023	31.777	17.084	34.742	104.626
9402. Jayawijaya	76.664	13.083	11.011	29.836	130.594
9403. Jayapura	6.601	10.082	12.217	24.030	52.930
9404. Nabire	11.568	11.308	13.675	31.611	68.162
9408. Yapen Waropen	5.014	7.487	5.454	18.698	36.653
9409. Biak Numfor	5.094	9.591	10.586	32.064	57.335
9410. Paniai	60.558	11.063	16.458	21.027	109.106
9411. Puncak Jaya	36.130	11.728	6.563	4.406	58.827
9412. Mimika	16.112	12.621	10.411	46.274	85.418
9413. Boven Digoel	7.159	7.796	3.939	9.021	27.915
9414. Mappi	10.008	25.353	6.443	5.143	46.947
9415. Asmat	30.426	6.319	2.667	3.380	42.792
9416. Yahukimo	86.846	17.788	4.668	5.785	115.087
9417. Pegunungan Bintang	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
9418. Tolikara	53.833	4.082	5.855	5.786	69.556
9419. Sarmi	4.469	7.191	2.882	4.223	18.765
9420. Keerom	4.856	5.915	4.507	9.318	24.596
9426. Waropen	1.879	1.265	1.878	4.327	9.349
9427. Supiori	1.405	1.882	1.049	2.110	6.446
9428. Mamberamo Raya	7.878	1.854	628	387	10.747
9429. Nduga	48.304	2.158	2.036	566	53.064
9430. Lanny Jaya	78.415	10.046	11.278	6.182	105.921
9431. Mamberamo Tengah	22.044	4.684	962	817	28.507
9432. Yalimo	28.866	4.436	2.146	2.236	37.684
9433. Puncak	45.475	2.537	1.433	1.372	50.817
9434. Dogiyai	21.357	19.169	8.692	4.599	53.817
9435. Intan Jaya	17.690	1.184	760	830	20.464
9436. Deiyai	34.739	2.569	2.311	3.296	42.915
9471. Kota Jayapura	5.816	8.445	13.089	89.044	116.394
Jumlah	750.229	253.413	180.682	401.110	1.585.434

Sumber: Sakernas, Agustus 2012

Tingginya jumlah angkatan kerja dengan pendidikan tidak tamat SD terjadi di seluruh kabupaten, kecuali pada Kabupaten Biak Numfor dan Kota Jayapura yang masing-masing adalah 8,88 persen dan 5,0

persen. Sementara itu, Kabupaten Nduga merupakan kabupaten yang jumlah angkatan kerja dengan pendidikan tidak tamat SD paling banyak yaitu mencapai 91,03 persen. Umumnya kabupaten-kabupaten di daerah pegunungan, lebih dari separuh penduduk angkatan kerjanya mempunyai pendidikan SD ke bawah. Hal ini terutama disebabkan karena masih minimnya fasilitas pendidikan di daerah tersebut.

Di sisi lain, kabupaten dengan persentase angkatan kerja yang berpendidikan SLTA ke atas cukup tinggi adalah Kota Jayapura (50,85 persen), Kabupaten Mimika (41,52 persen) dan Kabupaten Biak Numfor

Kota Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Mimika mempunyai persentase angkatan kerja berpendidikan SLTA ke atas yang cukup tinggi.

(40,15 persen). Ketiga daerah ini relatif lebih maju dibanding daerah lainnya, selain itu sebagai daerah yang berstatus kota yang biasanya memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, kesadaran masyarakat dalam hal pendidikan juga relatif lebih tinggi.

Kota Jayapura yang merupakan ibukota Provinsi Papua dan menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi mempunyai kuantitas dan kualitas angkatan kerja yang terbilang maju dibanding kabupaten lainnya di Papua. Hal ini akan menjadi sebuah modal dasar penggerak laju pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, tentunya akan menjadi catatan sendiri bagi Pemerintah dalam membangun dan mendongkrak pendidikan terutama di daerah pegunungan agar kualitas tenaga kerjanya juga dapat ditingkatkan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://papua.mps.go.id>

BAB V

PENDUDUK BEKERJA

5.1 Penduduk Bekerja menurut Kelompok Umur

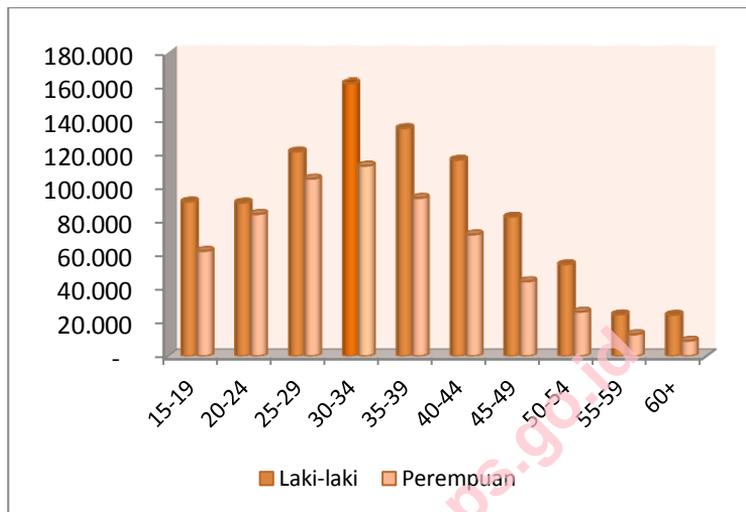
Dalam menganalisis ketenagakerjaan, penduduk yang bekerja dapat dibedakan menurut kelompok umur. Tujuannya adalah untuk melihat kontribusi pekerja berdasarkan kelompok umur dalam dunia pasar kerja. Idealnya, mayoritas penduduk yang bekerja dalam pasar kerja adalah mereka yang berusia prima. Namun tidak menutup kemungkinan penduduk usia muda dan tua dapat ikut andil dalam pasar tenaga kerja tersebut. Hal ini antara lain disebabkan adanya rasa tanggung jawab untuk mencari nafkah dan membantu ekonomi rumah tangga dan keluarga.

Pada tahun 2012 jumlah penduduk bekerja di Provinsi Papua adalah sebanyak 1.527.933 orang atau setara dengan 96,37 persen dari seluruh angkatan kerja yang ada. Dari jumlah tersebut 59,17 persen adalah laki-laki, sementara sisanya 40,83 persen adalah perempuan. Sementara itu, distribusi penduduk yang bekerja menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat dari gambar 5.1 berikut.

Secara umum penduduk yang bekerja pada setiap kelompok umur memiliki pola yang sama antara laki-laki dan perempuan. Pada kelompok umur muda belum banyak penduduk yang terjun ke pasar kerja. Hal ini terutama disebabkan karena mereka lebih cenderung memilih untuk bersekolah dibanding bekerja. Selanjutnya, memasuki usia prima (25 tahun ke atas) jumlah penduduk yang bekerja pun meningkat, sampai mencapai puncaknya pada kelompok usia 30-34 tahun yang mencapai 274.828 orang atau sekitar 17,99 persen. Sedangkan pekerja usia tua (55 tahun ke atas) yang masih aktif bekerja ada sebanyak 4,67 persen.

Penduduk bekerja di Papua paling banyak berada pada kelompok usia 30-34 tahun.

Gambar 5.1 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua Tahun 2012

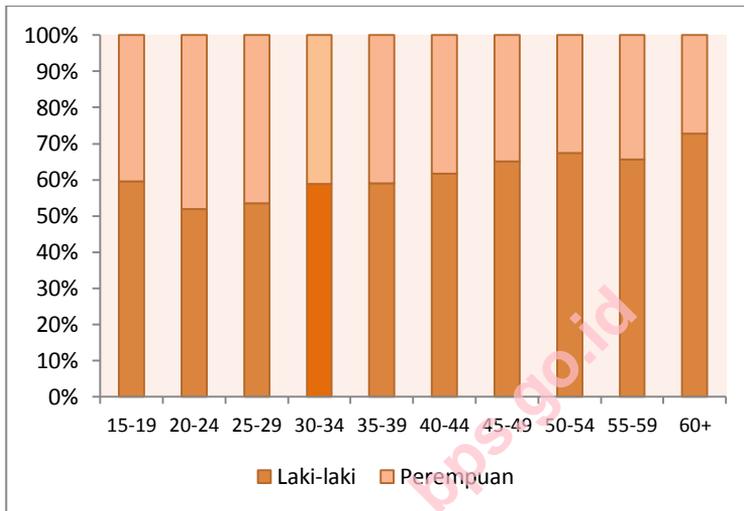


Sumber: Sakernas, Agustus 2012

Selain itu, dari gambar di atas juga menunjukkan bahwa penduduk usia kerja dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal ini berlaku pada setiap kelompok umur, dimana secara jumlah dan persentase perempuan yang bekerja berada di bawah laki-laki.

Sejalan dengan kondisi tersebut, persentase perempuan yang terlibat dalam dunia kerja juga mengalami penurunan seiring dengan peningkatan umurnya. Sebaliknya, persentase laki-laki yang bekerja pada setiap kelompok umur justru mengalami peningkatan. Sebagai ilustrasi tampak pada kelompok usia 45-49 tahun, persentase laki-laki dan perempuan yang bekerja berturut-turut adalah 65,09 persen dan 34,91 persen. Kemudian pada kelompok usia 60 tahun ke atas persentasenya menjadi 72,84 persen dan 27,16 persen. Gambaran persentase penduduk bekerja menurut jenis kelamin pada setiap kelompok umur dapat dilihat pada Gambar 5.2 di bawah ini.

Gambar 5.2 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua Tahun 2012



Sumber: Sakernas, Agustus 2012

5.2 Penduduk Bekerja menurut Kabupaten/Kota

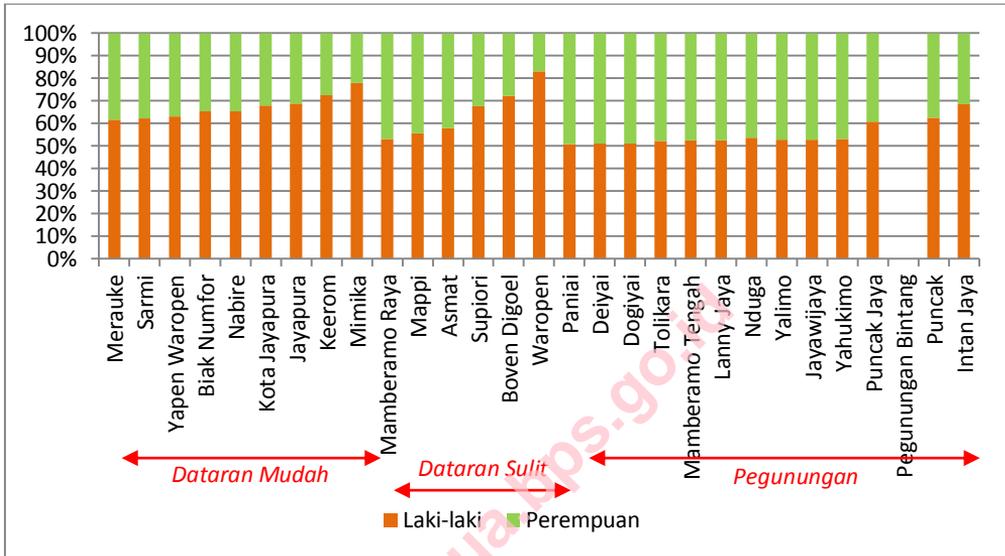
Pola sebaran penduduk bekerja di Provinsi Papua menurut kabupaten/kota sama dengan pola sebaran angkatan kerja yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kabupaten dengan jumlah penduduk bekerja paling tinggi terdapat pada Kabupaten Jayawijaya, yaitu sebanyak 128.389 orang dan yang paling rendah adalah Kabupaten Supiori sebanyak 5.615 orang.

Tabel 5.1 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
9401. Merauke	61.218	37.862	99.080
9402. Jayawijaya	67.959	60.430	128.389
9403. Jayapura	33.409	15.143	48.552
9404. Nabire	41.848	22.052	63.900
9408. Yapen Waropen	21.366	12.510	33.876
9409. Biak Numfor	33.409	17.674	51.083
9410. Paniai	55.306	53.613	108.919
9411. Puncak Jaya	35.365	22.725	58.090
9412. Mimika	61.883	17.431	79.314
9413. Boven Digoel	19.276	7.463	26.739
9414. Mappi	25.708	20.404	46.112
9415. Asmat	24.552	17.865	42.417
9416. Yahukimo	60.649	53.926	114.575
9417. Pegunungan Bintang	n.a	n.a	n.a
9418. Tolikara	35.763	32.911	68.674
9419. Sarmi	11.016	6.705	17.721
9420. Keerom	17.716	6.701	24.417
9426. Waropen	7.163	1.466	8.629
9427. Supiori	3.799	1.816	5.615
9428. Mamberamo Raya	5.572	4.936	10.508
9429. Nduga	28.437	24.627	53.064
9430. Lanny Jaya	55.696	50.225	105.921
9431. Mamberamo Tengah	14.945	13.562	28.507
9432. Yalimo	19.859	17.825	37.684
9433. Puncak	30.796	18.395	49.191
9434. Dogiyai	26.527	25.440	51.967
9435. Intan Jaya	13.999	6.465	20.464
9436. Deiyai	21.866	21.049	42.915
9471. Kota Jayapura	69.033	32.577	101.610
Jumlah	904.135	623.798	1.527.933

Sumber: Sakernas, Agustus 2012

Gambar 5.3 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Topografi di Provinsi Papua Tahun 2012



Sumber: Sakernas, Agustus 2012

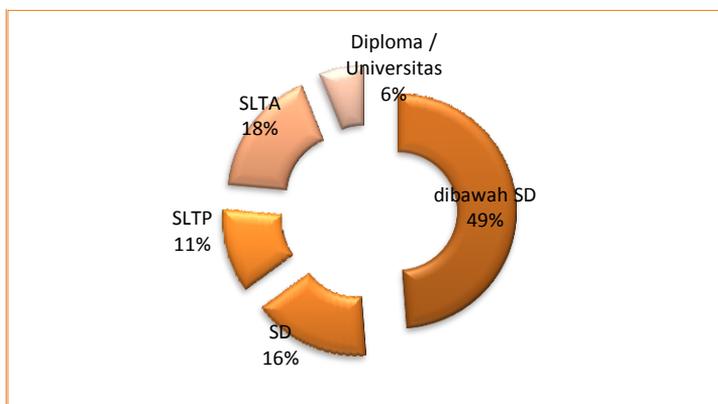
Gambar 5.3 di atas menunjukkan distribusi penduduk yang bekerja menurut kabupaten dan jenis kelamin. Dari gambar tersebut tampak bahwa pada kabupaten dengan topografi berupa dataran yang mudah dijangkau, persentase penduduk laki-laki yang bekerja lebih banyak dibanding perempuan. Demikian halnya dengan kabupaten yang tergolong bertopografi dataran sulit, secara umum laki-laki lebih mendominasi dalam hal pekerjaan. Sebaliknya, pada kabupaten di pegunungan persentase laki-laki dan perempuan yang bekerja hampir sama. Contohnya di Kabupaten Deiyai, persentase laki-laki dan perempuan yang bekerja masing-masing adalah 50,95 persen dan 49,05 persen, di mana secara persentase tidak terpaut jauh.

5.3 Penduduk Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Selain dapat dibedakan menurut kelompok umur, dalam ketenagakerjaan penduduk yang bekerja juga dapat dibedakan menurut tingkat pendidikan. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar pasar tenaga kerja dapat menyerap tenaga kerja dengan tingkat keahlian atau keterampilan tertentu sesuai dengan tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang tidak menjamin semakin mudah baginya untuk memperoleh pekerjaan apalagi yang sesuai dengan pendidikannya. Adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup menyebabkan pasar tenaga kerja yang dimasuki seseorang yang berpendidikan tinggi tak jarang menjadi tidak tepat.

Pada tahun 2012, lebih dari separuh penduduk yang bekerja adalah berpendidikan SD ke bawah, bahkan 49 persennya merupakan penduduk yang tidak tamat SD atau belum pernah sekolah. Tingkat pendidikan berikutnya adalah SLTP dan SLTA yang berturut-turut mempunyai persentase 11 persen dan 18 persen. Sementara penduduk dengan tingkat pendidikan Diploma ke atas hanya sebanyak 6 persen.

Gambar 5.4 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2012



Sumber: Sakernas, Agustus 2012

An orange scroll banner with a gradient from light to dark orange, featuring a shadow and a rolled-up edge effect on the left and right sides.

BAB V. PENDUDUK BEKERJA

<http://paperkit.net>

Tabel 5.2 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Pendidikan yang Ditamatkan				Jumlah
	< SD	SD	SLTP	SLTA+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9401. Merauke	20.396	31.501	16.152	31.031	99.080
9402. Jayawijaya	76.664	12.967	11.011	27.747	128.389
9403. Jayapura	6.430	9.302	11.815	21.005	48.552
9404. Nabire	11.568	11.308	13.251	27.773	63.900
9408. Yapen Waropen	4.945	7.207	5.196	16.528	33.876
9409. Biak Numfor	4.732	9.064	9.777	27.510	51.083
9410. Paniai	60.558	10.876	16.458	21.027	108.919
9411. Puncak Jaya	36.029	11.728	6.245	4.088	58.090
9412. Mimika	14.875	12.162	9.644	42.633	79.314
9413. Boven Digoel	6.996	7.646	3.797	8.300	26.739
9414. Mappi	10.008	24.984	6.044	5.076	46.112
9415. Asmat	30.426	6.319	2.667	3.005	42.417
9416. Yahukimo	86.846	17.577	4.668	5.484	114.575
9417. Pegunungan Bintang	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
9418. Tolikara	53.499	4.082	5.855	5.238	68.674
9419. Sarmi	4.317	6.741	2.837	3.826	17.721
9420. Keerom	4.856	5.915	4.507	9.139	24.417
9426. Waropen	1.802	1.265	1.829	3.733	8.629
9427. Supiori	1.233	1.819	844	1.719	5.615
9428. Mamberamo Raya	7.703	1.790	628	387	10.508
9429. Nduga	48.304	2.158	2.036	566	53.064
9430. Lanny Jaya	78.415	10.046	11.278	6.182	105.921
9431. Mamberamo Tengah	22.044	4.684	962	817	28.507
9432. Yalimo	28.866	4.436	2.146	2.236	37.684
9433. Puncak	44.429	2.537	993	1.232	49.191
9434. Dogiyai	21.357	17.319	8.692	4.599	51.967
9435. Intan Jaya	17.690	1.184	760	830	20.464
9436. Deiyai	34.739	2.569	2.311	3.296	42.915
9471. Kota Jayapura	5.816	8.122	12.300	75.372	101.610
Jumlah	745.543	247.308	174.703	360.379	1.527.933

Sumber: Sakernas, Agustus 2012

Begitu juga jika melihat tingkat pendidikan pekerja menurut kabupaten/kota yang disajikan pada Tabel 5.2 di atas. Pekerja

berpendidikan kurang dari SD dan tamat SD memiliki persentase terbesar dari jumlah pekerja di masing-masing kabupaten kecuali pada Kabupaten Biak Numfor dan Kota Jayapura yang memiliki persentase kurang dari 10 persen.

Kualitas pendidikan pekerja yang masih rendah ini terutama terjadi di daerah pegunungan yang minim fasilitas pendidikan. Bahkan di Kabupaten Nduga, Puncak, Intan Jaya dan Deiyai memiliki pekerja berpendidikan kurang dari SD dengan persentase lebih dari 80 persen. Kenyataan yang menyisakan tugas berat bagi Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah setempat untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan pekerjanya.

Di sisi lain pekerja dengan pendidikan tinggi (Diploma/ Universitas) masih merupakan fenomena langka yang jarang ditemukan terutama pada kabupaten di daerah pegunungan. Buktinya adalah persentase pekerja berpendidikan tinggi rata-rata masih di bawah 1 persen. Salah satu penyebabnya adalah tidak tersedianya lapangan kerja yang sesuai dengan pendidikan mereka, sehingga mereka akan cenderung bermigrasi ke daerah lain.

5.4 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha yang digunakan BPS mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha akan menunjukkan sektor ekonomi apa yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Untuk memudahkan dalam analisis, publikasi ini menggunakan pengelompokan lapangan usaha dalam tiga kelompok, yaitu pertanian, industri, dan Jasa. Tabel 5.3 dan Tabel 5.4 di bawah menggambarkan distribusi penduduk yang bekerja menurut kabupaten/kota dan lapangan pekerjaan utama.

Tabel 5.3 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Papua Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah
	Pertanian	Industri	Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9401. Merauke	51.026	8.733	39.321	9.080
9402. Jayawijaya	107.377	984	20.028	128.389
9403. Jayapura	23.384	5.027	20.141	48.552
9404. Nabire	23.450	6.158	34.292	63.900
9408. Yapen Waropen	16.391	2.341	15.144	33.876
9409. Biak Numfor	9.940	6.724	34.419	51.083
9410. Paniai	99.353	395	9.171	108.919
9411. Puncak Jaya	55.781	0	2.309	58.090
9412. Mimika	18.236	28.390	32.688	79.314
9413. Boven Digoel	17.206	2.651	6.882	26.739
9414. Mappi	38.681	455	6.976	46.112
9415. Asmat	37.669	172	4.576	42.417
9416. Yahukimo	109.623	115	4.832	114.575
9417. Pegunungan Bintang	n.a	n.a	n.a	n.a
9418. Tolikara	65.326	108	3.240	68.674
9419. Sarmi	12.880	1.127	3.714	17.721
9420. Keerom	15.575	1.611	7.231	24.417
9426. Waropen	4.992	621	3.016	8.629
9427. Supiori	3.591	642	1.382	5.615
9428. Mamberamo Raya	10.470	0	38	10.508
9429. Nduga	53.008	0	56	53.064
9430. Lanny Jaya	104.925	0	996	105.921
9431. Mamberamo Tengah	28.507	0	0	28.507
9432. Yalimo	36.463	0	1.221	37.684
9433. Puncak	48.557	0	634	49.191
9434. Dogiyai	50.886	0	1.081	51.967
9435. Intan Jaya	20.002	0	462	20.464
9436. Deiyai	42.569	0	346	42.915
9471. Kota Jayapura	6.941	12.660	82.009	101.610
Jumlah	1.112.814	78.914	336.205	1.527.933

Sumber: Sakernas, Agustus 2012

Tabel 5.4 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Papua Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah
	Pertanian	Industri	Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9401. Merauke	51,50	8,81	39,69	100,00
9402. Jayawijaya	83,63	0,77	15,60	100,00
9403. Jayapura	48,16	10,35	41,48	100,00
9404. Nabire	36,70	9,64	53,67	100,00
9408. Yapen Waropen	48,39	6,91	44,70	100,00
9409. Biak Numfor	19,46	13,16	67,38	100,00
9410. Paniai	91,22	0,36	8,42	100,00
9411. Puncak Jaya	96,03	0,00	3,97	100,00
9412. Mimika	22,99	35,79	41,21	100,00
9413. Boven Digoel	64,35	9,91	25,74	100,00
9414. Mappi	83,88	0,99	15,13	100,00
9415. Asmat	88,81	0,41	10,79	100,00
9416. Yahukimo	95,68	0,10	4,22	100,00
9417. Pegunungan Bintang	n.a	n.a	n.a	n.a
9418. Tolikara	95,12	0,16	4,72	100,00
9419. Sarmi	72,68	6,36	20,96	100,00
9420. Keerom	63,79	6,60	29,61	100,00
9426. Waropen	57,85	7,20	34,95	100,00
9427. Supiori	63,95	11,43	24,61	100,00
9428. Mamberamo Raya	99,64	0,00	0,36	100,00
9429. Nduga	99,89	0,00	0,11	100,00
9430. Lanny Jaya	99,06	0,00	0,94	100,00
9431. Mamberamo Tengah	100,00	0,00	0,00	100,00
9432. Yalimo	96,76	0,00	3,24	100,00
9433. Puncak	98,71	0,00	1,29	100,00
9434. Dogiyai	97,92	0,00	2,08	100,00
9435. Intan Jaya	97,74	0,00	2,26	100,00
9436. Deiyai	99,19	0,00	0,81	100,00
9471. Kota Jayapura	6,83	12,46	80,71	100,00
Jumlah	72,83	5,16	22,00	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2012

- *Sektor Pertanian masih menjadi sektor unggulan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Papua.*
- *Akan tetapi, pada beberapa Kabupaten/Kota sudah mengalami pergeseran dari pertanian ke industri dan jasa.*

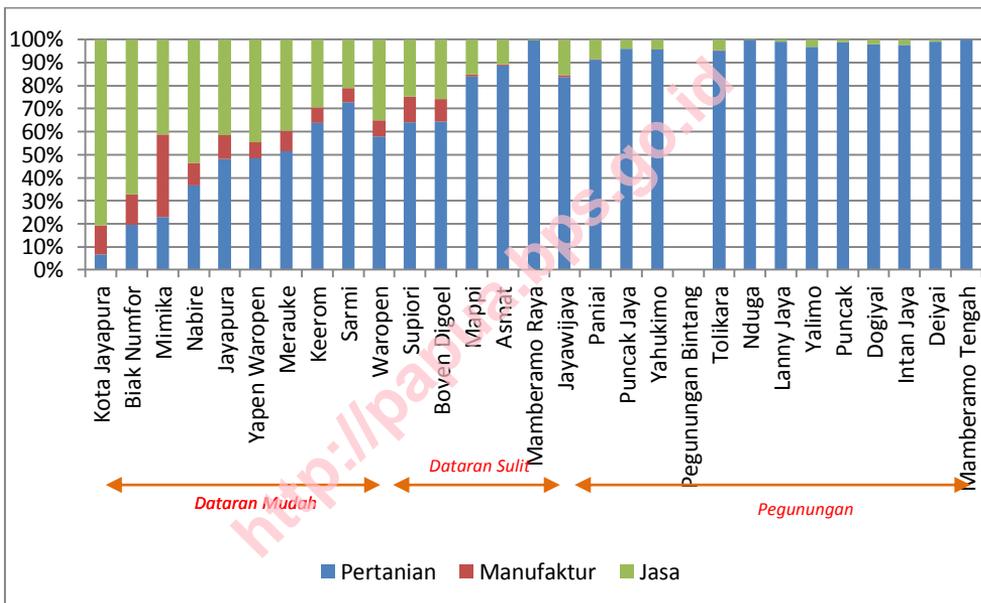
Kedua tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Papua bertumpu pada sektor pertanian. Pada tahun 2012, persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian mencapai 1.112.814 orang atau sekitar 72,83 persen dari total seluruh pekerja. Sementara itu, sektor berikutnya yang menjadi tulang punggung perekonomian Papua adalah sektor jasa dengan jumlah pekerja sebanyak 336.205 orang atau sekitar 22 persen. Kemudian pekerja yang bekerja pada sektor industri hanya sekitar 5,16 persen. Meskipun pada dasarnya kontribusi terbesar perekonomian Papua berasal dari sektor manufaktur berupa pertambangan, namun kenyataannya tenaga kerja yang terserap di sektor ini hanya sedikit.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, belum ada pergeseran sektor yang berarti dalam struktur perekonomian Papua. Pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan. Namun jika ditinjau menurut kabupaten/kota, ada beberapa kabupaten/kota dimana sektor pertanian bukan merupakan sektor unggulan, karena telah mengalami pergeseran ke sektor sekunder. Gambaran mengenai persentase pekerja menurut lapangan usaha dan topografi wilayah tersaji pada Gambar 5.5 berikut.

Pergeseran struktur perekonomian dari pertanian ke sektor industri dan jasa umumnya terjadi di daerah dataran rendah. Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua, sebagian besar pekerja berada pada sektor jasa (80,71 persen), sedangkan sektor pertanian hanya sekitar 6,83 persen. Hal yang sama juga terjadi pada Kabupaten Biak Numfor dimana mayoritas pekerja terserap di sektor jasa (67,38 persen). Di samping itu, pada Kabupaten Mimika sektor jasa dan manufaktur merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Di sisi lain, sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama bagi penduduk di kabupaten-kabupaten dengan topografi pegunungan. Kabupaten tersebut mempunyai persentase pekerja pertanian lebih dari 90 persen. Kecuali pada Kabupaten Jayawijaya dengan persentase 83,63 persen.

Gambar 5.5 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan usaha dan Topografi di Provinsi Papua Tahun 2012



Sumber: Sakernas, Agustus 2012

Selanjutnya jika ditinjau berdasarkan pendidikannya, pekerja dengan pendidikan SD ke bawah mengelompok di sektor pertanian. Walaupun ada juga pekerja dengan pendidikan tinggi yang termasuk ke dalam sektor ini, yaitu sebanyak 5.786 orang atau sekitar 0,52 persen. Ada dua kemungkinan yang terjadi, yang pertama adalah karena terbatasnya lapangan usaha lain, sehingga mereka terpaksa bekerja di sektor pertanian. Kedua, bisa jadi mereka berperan sebagai pengusaha di bidang pertanian (bukan buruh tani).

Tabel 5.5 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2012

Lapangan Usaha	Pendidikan yang Ditamatkan					Jumlah
	< SD	SD	SLTP	SLTA	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian ¹⁾	718.324	200.648	114.935	73.121	5.786	1.112.814
Pertambangan ²⁾	5.629	2.306	5.610	16.903	1.652	32.100
Industri	2.044	2.743	4.397	7.489	325	16.998
LGA ³⁾	0	0	352	1.415	362	2.129
Konstruksi	1.930	3.467	5.344	13.877	3.069	27.687
Perdagangan ⁴⁾	10.586	23.201	22.877	50.126	7.652	114.442
Transportasi ⁵⁾	4.741	8.792	10.070	24.837	3.009	51.449
Lembaga Keuangan ⁶⁾	110	0	702	6.445	4.841	12.098
Jasa ⁷⁾	2.179	6.151	10.416	73.394	66.076	158.216
Jumlah	745.543	247.308	174.703	267.607	92.772	1.527.933

Sumber: Sakernas, Agustus 2012

Jika lapangan usaha kita rinci lagi menjadi 9 sektor, secara umum tampak bahwa sektor-sektor selain sektor pertanian, lebih membutuhkan spesifikasi pendidikan dengan level lebih tinggi dari SD. Misalnya pada sektor pertambangan, mayoritas pekerja yang terserap sekitar 52,66 persen adalah lulusan SLTA. Sama halnya dengan sektor industri, listrik dan gas, konstruksi, transportasi, lembaga keuangan, dan jasa dimana hampir 50 persennya menyerap pekerja dengan pendidikan minimal SLTA.

Tabel 5.6 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2012

Lapangan Usaha	Pendidikan yang Ditamatkan					Jumlah
	< SD	SD	SLTP	SLTA	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian ¹⁾	64,55	18,03	10,33	6,57	0,52	100,00
Pertambangan ²⁾	17,54	7,18	17,48	52,66	5,15	100,00
Industri	12,02	16,14	25,87	44,06	1,91	100,00
LGA ³⁾	0,00	0,00	16,53	66,46	17,00	100,00
Konstruksi	6,97	12,52	19,30	50,12	11,08	100,00
Perdagangan ⁴⁾	9,25	20,27	19,99	43,80	6,69	100,00
Transportasi ⁵⁾	9,21	17,09	19,57	48,27	5,85	100,00
Lembaga Keuangan ⁶⁾	0,91	0,00	5,80	53,27	40,01	100,00
Jasa ⁷⁾	1,38	3,89	6,58	46,39	41,76	100,00
Jumlah	48,79	16,19	11,43	17,51	6,07	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2012

Keterangan:

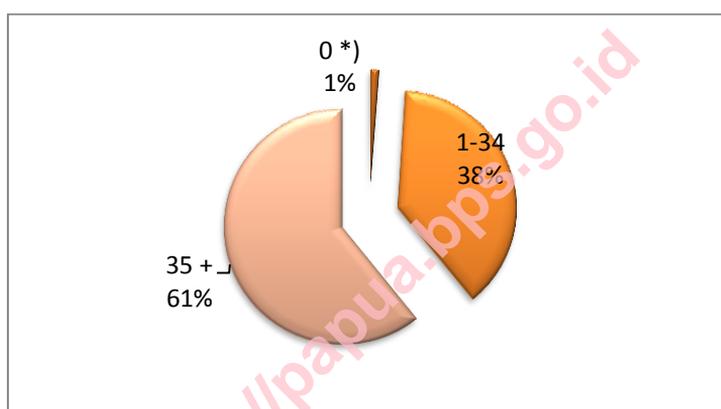
- 1 : Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2 : Pertambangan dan Penggalian
- 3 : Listrik, Gas, Uap, dan Air
- 4 : Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
- 5 : Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
- 6 : Lembaga Keuangan, Real Estate, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- 7 : Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

5.5 Penduduk Bekerja menurut Jam Kerja

Salah satu indikator untuk melihat kinerja pekerja adalah dengan melihat jumlah jam kerja. Hal ini berguna untuk mengetahui proporsi penduduk bekerja yang dapat dikategorikan sebagai pekerja “murni” dan proporsi penduduk bekerja namun dikategorikan pengangguran

karena jumlah jam kerjanya kurang dari jumlah jam kerja normal. Di Indonesia seseorang dikatakan murni bekerja apabila bekerja minimal 35 jam selama seminggu dengan konsep jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja tidak termasuk jam istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan. Jumlah jam kerja tersebut merupakan kumulatif selama satu minggu.

Gambar 5.6 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jam Kerja di Provinsi Papua Tahun 2012



Sumber: Sakernas, Agustus 2012

Secara keseluruhan persentase pekerja terbesar bekerja di atas 35 jam yaitu lebih dari 60 persen. Sementara itu pekerja dengan jam kerja kurang antara 1 sampai 34 jam ada sebanyak 38 persen atau dapat dikategorikan sebagai setengah penganggur. Sedangkan pekerja yang sementara tidak bekerja mempunyai persentase sekitar 1 persen.

Tabel 5.7 berikut menyajikan gambaran mengenai jumlah pekerja menurut jumlah jam kerja dan lapangan usaha. Pada umumnya sebagian besar pekerja memiliki jam kerja normal (di atas 35 jam). Khusus pada sektor pertanian, jumlah pekerja yang bekerja di atas 35 jam dengan di bawah jam kerja normal mempunyai jumlah yang tidak terpaut jauh, yaitu masing-masing secara persentase 53,83 persen dan 45,33 persen. Sebaliknya, pada sektor-sektor lain minimal 75 persen pekerjaanya bekerja pada jam kerja normal.

Tabel 5.7 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jumlah Jam Kerja di Provinsi Papua Tahun 2012

Lapangan Usaha	Jumlah Jam Kerja			Jumlah
	Sementara tidak bekerja (0 jam)	Di bawah jam kerja normal (1-34 jam)	Jam kerja normal (≥ 35 jam)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian	9.400	504.408	599.006	1.112.814
Pertambangan	255	2.309	29.536	32.100
Industri	541	3.031	13.426	16.998
LGA	0	265	1.864	2.129
Konstruksi	867	3.091	23.729	27.687
Perdagangan	933	23.185	90.324	114.442
Transportasi	737	7.790	42.922	51.449
Lembaga Keuangan	287	1.917	9.894	12.098
Jasa	2.539	36.703	118.974	158.216
Jumlah	15.559	532.699	929.675	1.527.933
%	1,02	38,14	60,85	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2012

5.6 Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan

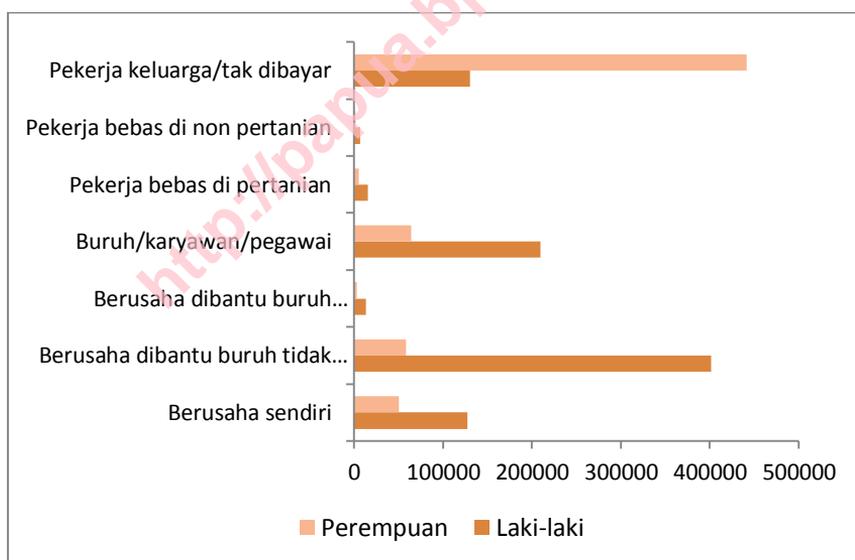
Status pekerjaan merupakan kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Salah satu kegunaan dalam menganalisis status pekerjaan pekerja adalah untuk mengetahui pekerja di sektor informal.

Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2012, tercatat bahwa status pekerjaan mayoritas pekerja di Papua adalah sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar yang berturut-turut mempunyai persentase 37,4 persen dan 30,1 persen. Selanjutnya adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 17,9 persen.

Bila ditinjau dari segi jenis kelaminnya, maka perempuan lebih banyak bekerja sebagai pekerja keluarga/tak dibayar. Secara persentase

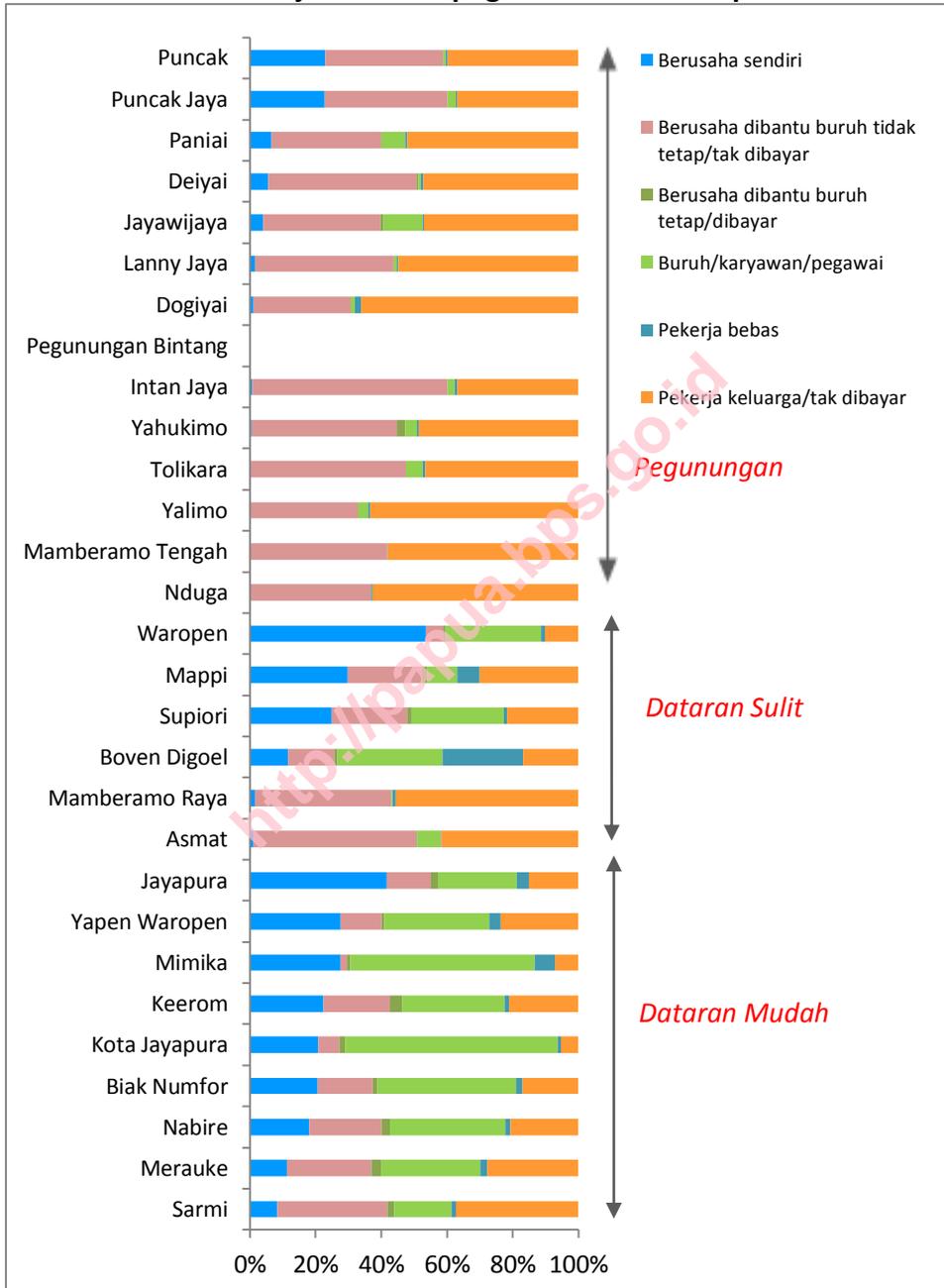
besarnya adalah 77,21 persen, dan sisanya 22,79 adalah laki-laki. Ketimpangan lain terjadi pada status buruh/karyawan/pegawai, dimana lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Laki-laki yang berstatus sebagai buruh/karyawan ada sebanyak 209.622 orang (76,61 persen), sementara perempuan hanya sebanyak 63.997 orang (23,39 persen). Hal ini memberikan kesimpulan bahwa secara umum laki-laki lebih dominan dalam hal pekerjaan. Meskipun pada status pekerja keluarga perempuan lebih mendominasi, namun kenyataannya tidak ada output yang dihasilkan, mereka tidak menerima upah atau penghasilan dari apa yang mereka kerjakan.

Gambar 5.7 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012



Sumber: Sakernas, Agustus 2012

Gambar 5.8 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Topografi di Provinsi Papua Tahun 2012

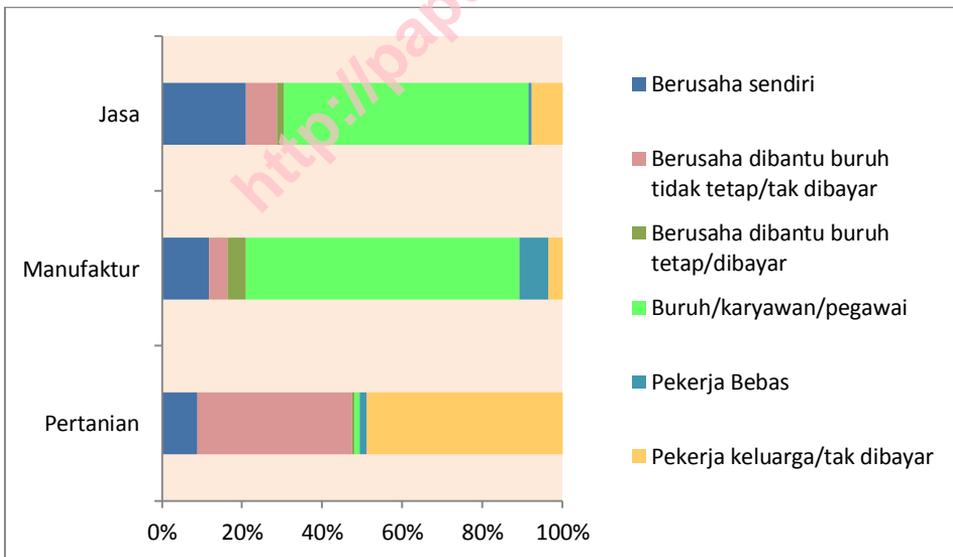


Sumber: Sakernas, Agustus 2012

Gambaran mengenai distribusi pekerja menurut status pekerjaan menurut topografi disajikan pada Gambar 5.8 di atas. Pada beberapa kabupaten di dataran mudah terlihat bahwa mayoritas penduduknya bekerja dengan status buruh//karyawan. Lain halnya dengan wilayah pegunungan seperti Kabupaten Mamberamo Tengah, Yalimo, Yahukimo, Tolikara, Paniai, dan Dogiyai, yang mempunyai kecenderungan bahwa mayoritas pekerjaannya adalah pekerja keluarga dan berusaha dibantu buruh tidak tetap. Sementara itu, di daerah pegunungan, penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan relatif sangat sedikit.

Sebagian besar pekerja di pegunungan berstatus sebagai pekerja tak dibayar.

Gambar 5.9 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2012



Sumber: Sakernas, Agustus 2012

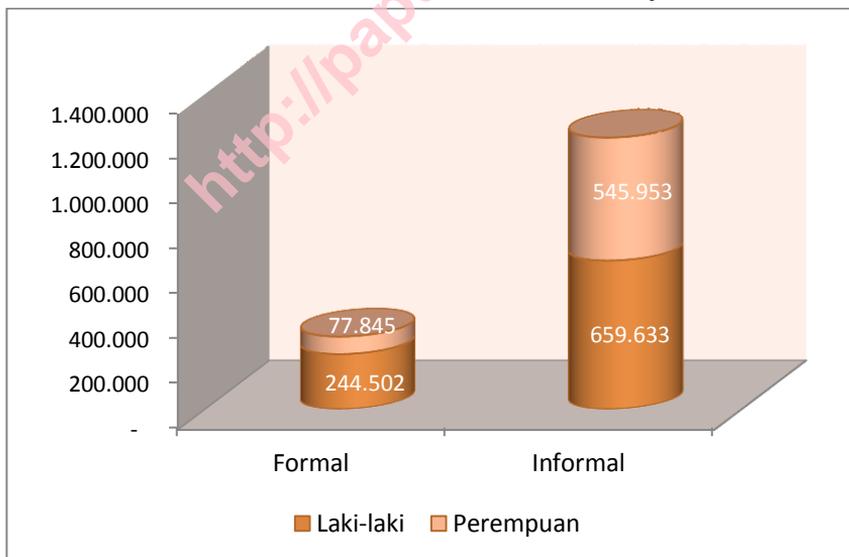
Jika ditinjau berdasarkan lapangan usahanya, maka jelas terlihat perbedaan status pekerjaan antara pertanian, manufaktur, dan jasa. Sebagian besar pekerja pertanian berstatus sebagai pekerja keluarga

dan berusaha dibantu buruh tidak tetap, masing-masing memiliki persentase 48,79 persen dan 38,65 persen. Sementara itu sektor manufaktur lebih didominasi oleh pekerja dengan status sebagai buruh/karyawan dimana persentasenya mencapai 68,32 persen. Demikian halnya dengan sektor jasa sebanyak 61,07 persennya merupakan pekerja dengan status buruh/karyawan.

5.7 Penduduk Bekerja menurut Sektor Fomal Informal

Sesuai dengan definisi yang dijelaskan pada Bab II tentang klasifikasi sektor formal dan informal, hanya sekitar 21,10 persen penduduk bekerja di sektor formal, sisanya 78,90 persen merupakan pekerja sektor informal.

Gambar 5.10 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012



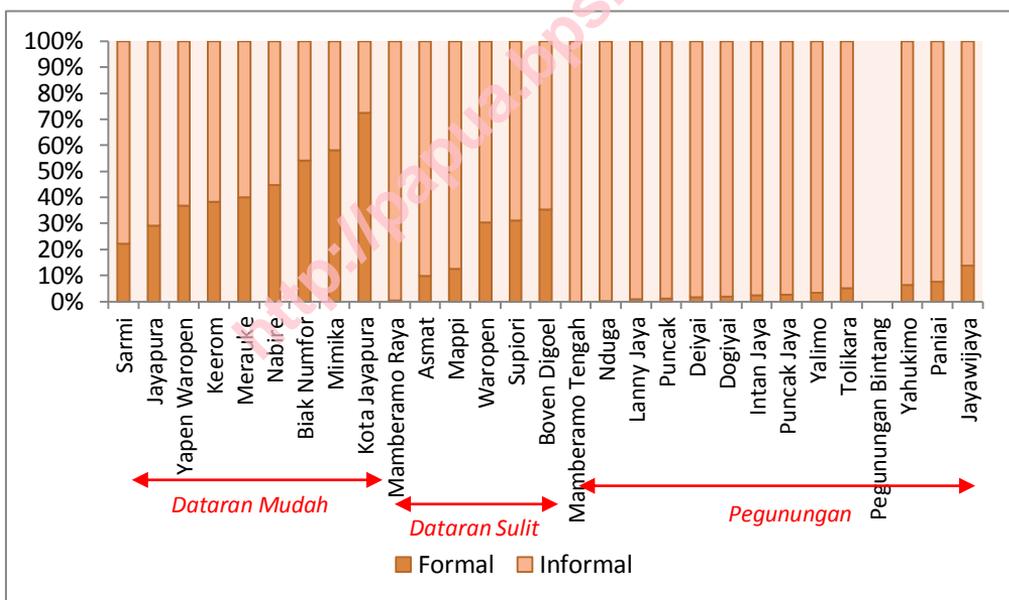
Sumber: Sakernas, Agustus 2012

Sementara jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, jelas terlihat bahwa sektor formal lebih banyak didominasi oleh laki-laki,

sedangkan sektor informal relatif seimbang antara pekerja laki-laki dan perempuan.

Banyaknya pekerja di sektor informal sangat berkaitan dengan banyaknya penduduk bekerja pada sektor pertanian. Seperti telah dipaparkan sebelumnya bahwa pertanian mendominasi penyerapan tenaga kerja di sebagian besar kabupaten di Provinsi Papua. Banyaknya penduduk bekerja di sektor pertanian, terutama yang berstatus pekerja tidak dibayar menyebabkan tingginya persentase pekerja sektor informal.

Gambar 5.11 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status dan Topografi di Provinsi Papua Tahun 2012



Sumber: Sakernas, Agustus 2012

Jika dilihat sebaran pekerja formal dan informal di kabupaten/kota di Provinsi Papua terlihat bahwa pekerja formal lebih banyak terdapat di daerah dataran mudah. Di pihak lain, pekerja informal lebih banyak mendominasi di daerah pegunungan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://papua.bps.go.id>

BAB VI. PENGANGGURAN

<http://paperkit.net>

BAB VI

PENGANGGURAN

6.1 Pengangguran menurut Kelompok Umur

Pengangguran secara konsepsi merupakan bagian dari angkatan kerja. Adanya sejumlah pengangguran pada dasarnya menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply*) pada pasar kerja dibanding lowongan yang tersedia. Pengangguran merupakan keadaan seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan.

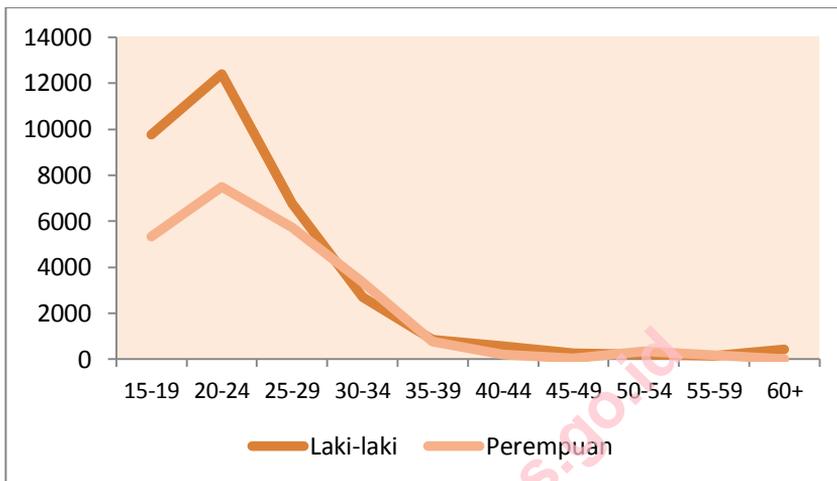
Pada tahun 2012, jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Papua adalah sebanyak 57.501 orang atau sebesar 3,63 persen dari total angkatan kerja. Banyak pemerhati ketenagakerjaan berpendapat bahwa nilai ini adalah terlalu kecil. Namun, perlu diingat kembali bahwa seseorang yang bekerja membantu orang tuanya walaupun sebentar asalkan lebih dari 1 jam dalam satu minggu tetap tergolong sebagai bekerja.

Jumlah pengangguran di Papua sebesar 57.501 orang

Gambar 6.1 berikut menggambarkan jumlah pengangguran yang dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Jumlah pengangguran paling tinggi berada pada kelompok usia 20-24 tahun, baik pada laki-laki maupun perempuan. Hal ini ditengarai karena sebagai output dari dunia pendidikan. Pada umur-umur tersebut banyak orang yang setelah lulus sekolah sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha.

Pengangguran terbanyak berada pada kelompok usia 20-24 tahun

Gambar 6.1 Pengangguran menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012



Sumber: Sakernas, Agustus 2012

6.2 Pengangguran menurut Kabupaten/Kota

Secara keseluruhan, sebagian besar pengangguran di Papua adalah laki-laki yaitu 34.041 orang atau sekitar 59,20 persen. Jika ditinjau menurut kabupaten/kota, pengangguran terbanyak terjadi di Kota Jayapura sebesar 14.784 orang. Hal ini terjadi karena banyak penduduk dari berbagai kabupaten yang datang untuk mencari pekerjaan di ibukota provinsi ini, mengingat lebih banyak peluang dan fasilitas yang disediakan dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain.

Di beberapa kabupaten, angka pengangguran mencapai nol persen. Artinya semua angkatan kerja terserap seluruhnya dalam pasar kerja yang ada. Kabupaten tersebut diantaranya adalah: Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Intan Jaya, dan Deiyai. Jika ditinjau lebih dalam, kabupaten-kabupaten yang memiliki angka pengangguran nol persen adalah kabupaten yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian.

Tabel 6.1 Pengangguran menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
9401. Merauke	3.241	2.305	5.546
9402. Jayawijaya	892	1.313	2.205
9403. Jayapura	2.987	1.391	4.378
9404. Nabire	2.335	1.927	4.262
9408. Yapen Waropen	1.669	1.108	2.777
9409. Biak Numfor	3.313	2.939	6.252
9410. Paniai	187	0	187
9411. Puncak Jaya	101	636	737
9412. Mimika	4.355	1.749	6.104
9413. Boven Digoel	542	634	1.176
9414. Mappi	346	489	835
9415. Asmat	168	207	375
9416. Yahukimo	260	252	512
9417. Pegunungan Bintang	n.a	n.a	n.a
9418. Tolikara	882	0	882
9419. Sarmi	558	486	1.044
9420. Keerom	0	179	179
9426. Waropen	505	215	720
9427. Supiori	428	403	831
9428. Mamberamo Raya	192	47	239
9429. Nduga	0	0	0
9430. Lanny Jaya	0	0	0
9431. Mamberamo Tengah	0	0	0
9432. Yalimo	0	0	0
9433. Puncak	1.012	614	1.626
9434. Dogiyai	1.032	818	1.850
9435. Intan Jaya	0	0	0
9436. Deiyai	0	0	0
9471. Kota Jayapura	9.036	5.748	14.784
Jumlah	34.041	23.460	57.501

Sumber: Sakernas, Agustus 2012

6.3 Pengangguran menurut Keegiatannya

Pengangguran menurut kegiatannya terdiri dari mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa/ merasa tidak mungkin dapat kerja, dan sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Tabel 6.2 berikut menyajikan gambaran tentang jumlah pengangguran menurut jenis kelamin dan kegiatannya.

Tabel 6.2 Pengangguran menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012

Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mencari Pekerjaan	23.787	18.137	41.924	72,91
Mempersiapkan Usaha	283	210	493	0,86
Putus asa/merasa tidak mungkin mendapat kerja	8.979	4.037	13.016	22,64
Sudah punya tapi belum mulai kerja	992	1.076	2.068	3,60
Jumlah	34.041	23.460	57.501	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2012

Bila dilihat menurut kegiatannya, dari seluruh pengangguran di Papua, persentase terbesar adalah yang mencari pekerjaan sebesar 72,91 persen. Mereka yang mencari pekerjaan adalah mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; mereka yang sudah pernah bekerja, karena suatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; serta mereka yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena suatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar pengangguran di Papua adalah mencari pekerjaan

Persentase terkecil terdapat pada kegiatan mempersiapkan usaha, yaitu sebesar 0,86 persen. Mempersiapkan usaha cenderung pada pekerjaan yang berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap atau berusaha dibantu buruh tetap. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan penduduk untuk berwiraswasta sangat kecil, dan mereka lebih memilih mencari pekerjaan daripada membuka lapangan usaha. Di samping itu ada sebanyak 3,6 persen pengangguran yang sudah diterima bekerja, namun belum mulai bekerja. Hampir pasti angka ini akan bergeser dari status sebagai pengangguran menjadi bekerja.

6.4 Pengangguran menurut Tingkat Pendidikan

Kualitas mutu dan kompetensi sumber daya manusia dalam pasar tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui sarana pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang yang termasuk angkatan kerja akan mempengaruhi dan meningkatkan tingkat produktivitas dalam pekerjaannya. Untuk itu analisis pengangguran menurut tingkat pendidikan dapat digunakan sebagai indikator ketidakmampuan pasar tenaga kerja memanfaatkan *supply* angkatan kerja.

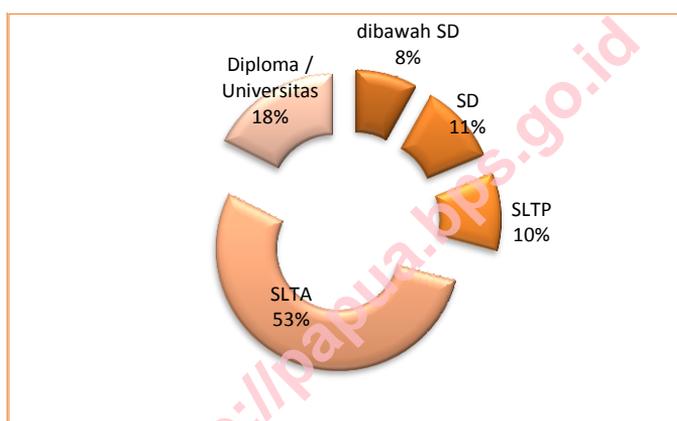
Tingkat pengangguran terdidik merupakan indikator dari besarnya jumlah dan persentase pengangguran yang memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi di suatu wilayah. Secara absolut, jumlah pengangguran di Papua terdistribusi di semua jenjang pendidikan, seperti disajikan pada Gambar 6.2. Separuh lebih pengangguran di Provinsi Papua berpendidikan SLTA/sederajat, yaitu sebesar 53 persen. Selanjutnya adalah diploma/universitas sebesar 18 persen.

Separuh lebih pengangguran di Provinsi Papua berpendidikan tinggi

Tingginya pengangguran pada pendidikan tinggi lebih disebabkan karena mereka lebih bersifat selektif dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan atau keterampilan yang mereka miliki.

Seringkali terjadi bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sementara itu, mereka memiliki kecenderungan untuk lebih memilih mencari pekerjaan di sektor formal daripada informal, sehingga menyebabkan angka pengangguran yang berpendidikan menengah/tinggi lebih tinggi dibanding yang berpendidikan rendah.

Gambar 6.2 Pengangguran menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2012



Sumber: Sakernas, Agustus 2012

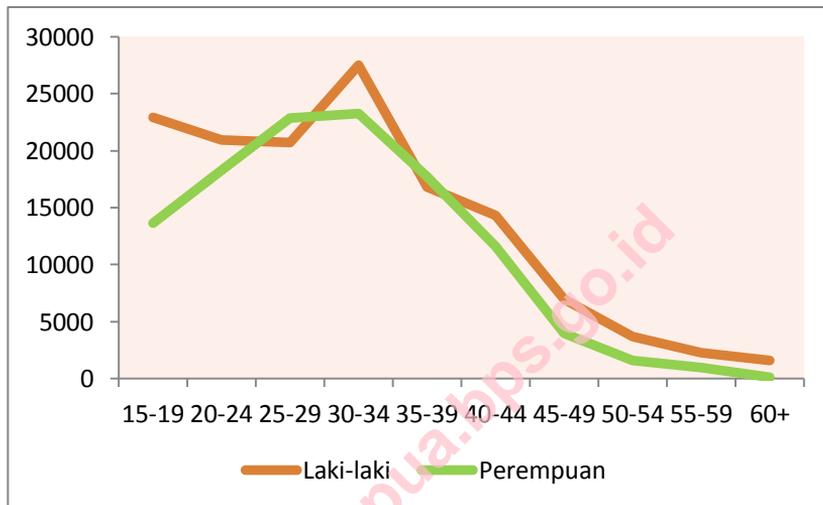
6.5 Setengah Pengangguran

Penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dikategorikan dalam kelompok setengah pengangguran. Jumlah setengah pengangguran di Provinsi Papua Tahun 2012 adalah sebanyak 582.699 orang, yang terdiri dari 251.630 orang setengah penganggur terpaksa (43,18 persen), dan 331.069 orang setengah penganggur sukarela (56,82 persen).

Dalam kenyataannya setengah pengangguran sukarela tidak terlalu diperhitungkan dalam kategori pengangguran. Hal ini karena setengah penganggur sukarela memang tidak sedang mencari pekerjaan

atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, meskipun jam kerjanya kurang dari jam kerja normal.

Gambar 6.3 Setengah Penganggur Terpaksa menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012

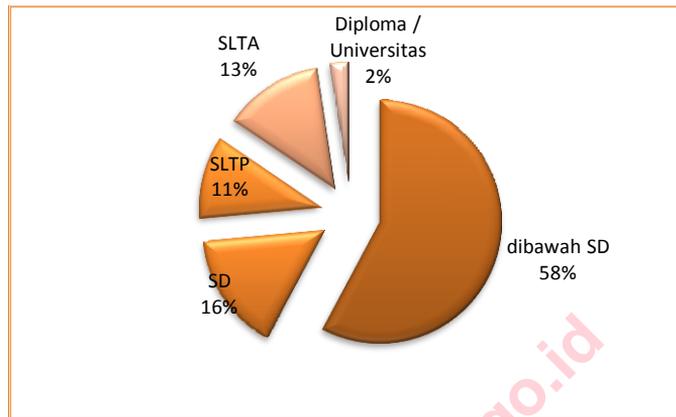


Sumber: Sakernas, Agustus 2012

Setengah penganggur terpaksa paling banyak berada pada kelompok umur 30-34 tahun. Pada kelompok usia ini, kecenderungan mencari pekerjaan atau menerima tawaran pekerjaan lain masih tinggi. Artinya mereka yang masih bekerja di bawah jam kerja normal masih punya keinginan untuk menambah pekerjaan lain (paruh waktu) atau mencari pekerjaan lain yang lebih sesuai. Dengan semakin meningkatnya umur, maka jumlah setengah penganggur pun semakin menurun.

Jika dilihat berdasarkan gender, secara umum jumlah penganggur terpaksa lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Meskipun pada umur-umur tertentu (25-29 tahun dan 35-39 tahun) jumlah setengah penganggur perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Gambar 6.4 Setengah Penganggur Terpaksa menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2012



Sumber: Sakernas, Agustus 2012

Berbeda dengan pengangguran terbuka, sebagian besar setengah penganggur terpaksa berpendidikan SD ke bawah, yaitu sekitar 73,56 persen. Penduduk yang berpendidikan rendah cenderung bekerja seadanya, dan masih mencari pekerjaan yang lebih baik karena tuntutan ekonomi.

An orange scroll graphic with a gradient, featuring a rolled-up edge on the left and a small circular detail on the right. The text is centered on the scroll.

BAB VII.
INDIKATOR
KETENAGAKERJAAN

<http://www.bps.go.id>

BAB VII

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN

7.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa.

Secara keseluruhan, TPAK Provinsi Papua pada tahun 2012 adalah sebesar 78,91 persen. Umumnya TPAK laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Pada level provinsi, TPAK laki-laki adalah 88,31 persen, sementara perempuan 68,36 persen. Begitu juga TPAK pada seluruh kabupaten/kota, dimana partisipasi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Pada tahun 2012, TPAK Provinsi Papua adalah 78,91 persen

TPAK paling tinggi terdapat di Kabupaten Mamberamo Tengah yang mencapai 100 persen, dan terendah di Kota Jayapura sebesar 60,38 persen. Tingginya TPAK di Mamberamo Tengah antara lain dipengaruhi oleh dominasi sektor pertanian terhadap perekonomian.

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, maka tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi selalu lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini terjadi pada setiap kelompok umur. Partisipasi laki-laki paling tinggi adalah pada usia 45-49 tahun (99,60 persen). Hal ini berarti usia puncak pada laki-laki untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi adalah antara umur 45-49 tahun, sedangkan untuk perempuan antara umur 40-44 tahun.

Partisipasi perempuan untuk aktif secara ekonomi pada setiap kelompok umur selalu lebih rendah daripada laki-laki

Gambar 7.1 TPAK menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012



Sumber: Sakernas, Agustus 2012

Tabel 7.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012

Kabupaten/Kota	TPAK		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
9401. Merauke	85,69	59,59	73,36
9402. Jayawijaya	88,94	83,18	86,12
9403. Jayapura	83,49	43,46	64,84
9404. Nabire	85,76	54,02	71,07
9408. Yapen Waropen	79,48	49,13	64,64
9409. Biak Numfor	81,09	47,57	64,70
9410. Paniai	94,62	98,39	96,44
9411. Puncak Jaya	82,03	62,91	73,19
9412. Mimika	85,97	34,37	64,30
9413. Boven Digoel	89,07	46,77	70,56
9414. Mappi	93,07	82,30	87,95
9415. Asmat	95,06	75,84	85,87
9416. Yahukimo	98,19	96,05	97,17
9417. Pegunungan Bintang	n.a	n.a	n.a
9418. Tolikara	82,82	83,90	83,33
9419. Sarmi	84,70	68,56	77,69
9420. Keerom	84,99	42,63	66,50

Kabupaten/Kota	TPAK		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
9426. Waropen	83,67	20,46	53,78
9427. Supiori	78,35	45,93	63,04
9428. Mamberamo Raya	90,01	89,09	89,58
9429. Nduga	100,00	99,14	99,60
9430. Lanny Jaya	99,78	98,57	99,20
9431. Mamberamo Tengah	100,00	100,00	100,00
9432. Yalimo	97,83	98,66	98,22
9433. Puncak	89,69	58,39	74,71
9434. Dogiyai	94,50	89,14	91,80
9435. Intan Jaya	92,06	45,67	69,70
9436. Deiyai	96,63	96,18	96,41
9471. Kota Jayapura	76,96	41,96	60,38
PAPUA	88,31	68,36	78,91

Sumber: Sakernas, Agustus 2012

7.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator penting berikutnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase pengangguran terhadap angkatan kerja. TPT Provinsi Papua pada tahun 2012 adalah sebesar 3,63 persen terhadap total angkatan kerja. Jika ditinjau per kabupaten/kota, tingkat pengangguran paling tinggi ada di Kabupaten Supiori sebesar 12,89 persen. Menyusul berikutnya adalah Kota Jayapura sebesar 12,70 persen. Di sisi lain, pada kabupaten di daerah pegunungan tengah, seperti Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Intan Jaya, dan Deiyai memiliki TPT nol persen. Artinya tidak ada pengangguran di kabupaten-kabupaten tersebut.

Kabupaten Supiori mempunyai TPT paling tinggi di Papua yaitu 12,89 persen pada tahun 2012

Tabel 7.2 Tingkat Pangangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012

Kabupaten/Kota	TPT		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
9401. Merauke	5,03	5,74	5,30
9402. Jayawijaya	1,30	2,13	1,69
9403. Jayapura	8,21	8,41	8,27
9404. Nabire	5,28	8,04	6,25
9408. Yapen Waropen	7,25	8,14	7,58
9409. Biak Numfor	9,02	14,26	10,90
9410. Paniai	0,34	0,00	0,17
9411. Puncak Jaya	0,28	2,72	1,25
9412. Mimika	6,57	9,12	7,15
9413. Boven Digoel	2,73	7,83	4,21
9414. Mappi	1,33	2,34	1,78
9415. Asmat	0,68	1,15	0,88
9416. Yahukimo	0,43	0,47	0,44
9417. Pegunungan Bintang	n.a	n.a	n.a
9418. Tolikara	2,41	0,00	1,27
9419. Sarmi	4,82	6,76	5,56
9420. Keerom	0,00	2,60	0,73
9426. Waropen	6,59	12,79	7,70
9427. Supiori	10,13	18,16	12,89
9428. Mamberamo Raya	3,33	0,94	2,22
9429. Nduga	0,00	0,00	0,00
9430. Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00
9431. Mamberamo Tengah	0,00	0,00	0,00
9432. Yalimo	0,00	0,00	0,00
9433. Puncak	3,18	3,23	3,20
9434. Dogiyai	3,74	3,12	3,44
9435. Intan Jaya	0,00	0,00	0,00
9436. Deiyai	0,00	0,00	0,00
9471. Kota Jayapura	11,57	15,00	12,70
PAPUA	3,63	3,62	3,63

Sumber: Sakernas, Agustus 2012

Semakin kecil persentase TPT menunjukkan semakin besarnya tenaga kerja yang terserap dalam lapangan usaha/sector, juga

mencerminkan kestabilan suatu daerah di bidang ketenagakerjaan. Apabila terlalu banyak tenaga kerja yang tidak tertampung di lapangan usaha, atau lapangan usaha sangat terbatas untuk menyerap tenaga kerja yang terindikasi melalui TPT yang tinggi, maka masalah sosial (kejahatan, demonstrasi dan lainnya) akan sangat rawan.

7.3 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Selain TPAK dan TPT, masih ada satu indikator ketenagakerjaan yaitu Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), merupakan persentase tenaga kerja yang terserap pada seluruh sektor-sektor yang ada terhadap angkatan kerja. Dengan kata lain, TKK merupakan selisih TPT terhadap 100 persen.

Semakin tinggi TKK, makin banyak tenaga kerja yang terserap pada sektor-sektor yang ada

Semakin tinggi TKK, semakin banyak tenaga kerja yang terserap, akhirnya semakin stabil keadaan suatu daerah dalam hal ketenagakerjaan. Dari Tabel 7.3 berikut secara umum TKK di Provinsi Papua tergolong tinggi, bahkan di hampir semua kabupaten di daerah pegunungan mempunyai TKK sebesar 100 persen, seperti Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Yalimo.

Tingginya TKK di Papua disebabkan sebagian besar tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian atau tingkat pendidikan yang cukup tidak langsung menganggur, karena mereka diserap oleh sektor pertanian yang masih tradisional.

Tabel 7.3 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2012

Kabupaten/Kota	TKK		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
9401. Merauke	94,97	94,26	94,70
9402. Jayawijaya	98,70	97,87	98,31
9403. Jayapura	91,79	91,59	91,73
9404. Nabire	94,72	91,96	93,75
9408. Yapen Waropen	92,75	91,86	92,42
9409. Biak Numfor	90,98	85,74	89,10
9410. Paniai	99,66	100,00	99,83
9411. Puncak Jaya	99,72	97,28	98,75
9412. Mimika	93,43	90,88	92,85
9413. Boven Digoel	97,27	92,17	95,79
9414. Mappi	98,67	97,66	98,22
9415. Asmat	99,32	98,85	99,12
9416. Yahukimo	99,57	99,53	99,56
9417. Pegunungan Bintang	n.a	n.a	n.a
9418. Tolikara	97,59	100,00	98,73
9419. Sarmi	95,18	93,24	94,44
9420. Keerom	100,00	97,40	99,27
9426. Waropen	93,41	87,21	92,30
9427. Supiori	89,87	81,84	87,11
9428. Mamberamo Raya	96,67	99,06	97,78
9429. Nduga	100,00	100,00	100,00
9430. Lanny Jaya	100,00	100,00	100,00
9431. Mamberamo Tengah	100,00	100,00	100,00
9432. Yalimo	100,00	100,00	100,00
9433. Puncak	96,82	96,77	96,80
9434. Dogiyai	96,26	96,88	96,56
9435. Intan Jaya	100,00	100,00	100,00
9436. Deiyai	100,00	100,00	100,00
9471. Kota Jayapura	88,43	85,00	87,30
PAPUA	96,37	96,38	96,37

Sumber: Sakernas, Agustus 2012

7.4 Perkembangan Indikator Tenaga Kerja

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, penduduk usia kerja juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 jumlah penduduk usia kerja adalah sebanyak 1.401.848 orang, dan meningkat 43,32 persen menjadi 2.009.145 orang pada tahun 2012. Selama kurun waktu 2008 hingga 2012, peningkatan penduduk usia kerja selalu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah angkatan kerja.

Menurunnya angka pengangguran yang disertai dengan meningkatnya TPAK adalah pencapaian ideal yang diharapkan. Namun, pada tahun 2011 terjadi peningkatan TPT dari 3,55 persen menjadi 3,94 persen, dan diiringi juga dengan penurunan TPAK dari 80,99 persen menjadi 78,45 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kondisi ketenagakerjaan dibanding tahun sebelumnya. Akan tetapi, pada tahun 2012 kondisi ini kembali membaik yang ditandai dengan menurunnya angka pengangguran dan meningkatnya TPAK.

Tabel 7.4 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tahun 2008-2012

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angkatan Kerja	1.075.214	1.128.036	1.510.176	1.536.728	1.585.434
Bukan Angkatan Kerja	326.634	322.815	354.413	422.164	423.711
Usia Kerja	1.401.848	1.450.851	1.864.589	1.958.892	2.009.145
TPAK	76,7	77,75	80,99	78,45	78,91
TPT	4,39	4,08	3,55	3,94	3,63
TKK	95,61	95,92	96,45	96,06	96,37

Sumber: Sakernas, Agustus 2008-2012

7.5 Penduduk Bukan Angkatan Kerja

Tabel 7.5 Penduduk Bukan Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan di Provinsi Papua Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Jenis Kegiatan			Jumlah
	Sekolah	Mengurus RT	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9401. Merauke	16.781	18.594	2.627	38.002
9402. Jayawijaya	14.036	5.545	1.464	21.045
9403. Jayapura	11.598	15.454	1.654	28.706
9404. Nabire	12.198	13.871	1.677	27.746
9408. Yapen Waropen	8.019	10.858	1.171	20.048
9409. Biak Numfor	11.480	16.835	2.967	31.282
9410. Paniai	3.017	447	567	4.031
9411. Puncak Jaya	8.349	9.674	3.523	21.546
9412. Mimika	10.818	31.631	4.980	47.429
9413. Boven Digoel	3.062	7.820	767	11.649
9414. Mappi	3.405	2.539	489	6.433
9415. Asmat	1.199	4.650	1.191	7.040
9416. Yahukimo	1.761	1.359	235	3.355
9417. Pegunungan Bintang	n.a	n.a	n.a	n.a
9418. Tolikara	6.769	2.813	4.334	13.916
9419. Sarmi	2.815	2.105	469	5.389
9420. Keerom	4.669	6.811	909	12.389
9426. Waropen	1.924	5.229	881	8.034
9427. Supiori	1.392	1.799	589	3.780
9428. Mamberamo Raya	619	394	237	1.250
9429. Nduga	150	63	0	213
9430. Lanny Jaya	316	414	121	851
9431. Mamberamo Tengah	0	0	0	0
9432. Yalimo	334	30	319	683
9433. Puncak	1.060	11.490	4.652	17.202
9434. Dogiyai	1.695	2.178	931	4.804
9435. Intan Jaya	1.368	7.530	0	8.898
9436. Deiyai	1.263	280	57	1.600
9471. Kota Jayapura	33.286	36.586	6.518	76.390
Jumlah	163.383	216.999	43.329	423.711

Sumber: Sakernas, Agustus 2012

Bahasan ini sengaja ditampilkan satu bab bersama indikator ketenagakerjaan, sehingga dapat diketahui penyebaran penduduk bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja maupun sementara tidak bekerja. Dengan kata lain yang dikerjakan oleh penduduk bukan angkatan kerja adalah sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Secara keseluruhan, sebagian besar penduduk bukan angkatan kerja di Papua adalah mengurus rumah tangga yaitu sebesar 51,21 persen. Selanjutnya penduduk yang bersekolah sebesar 38,56 persen dan yang melakukan kegiatan lainnya ada sebesar 10,23 persen.

Sementara itu, jumlah penduduk bukan angkatan kerja di masing-masing kabupaten/kota berada pada rentang 0 (Mamberamo Tengah) sampai 76.390 (Kota Jayapura). Nilai nol di sini bukan berarti bahwa tidak ada penduduk usia kerja yang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya, tetapi lebih karena azas eksklusifitas yang menggolongkan orang hanya ke dalam satu jenis kegiatan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://papua.bps.go.id>

An orange scroll banner with a gradient from light to dark orange, featuring a shadow and a rolled-up edge effect on the left and right sides. The text is centered on the banner.

BAB VIII. KESIMPULAN

<http://paperkit.net>

BAB VIII

KESIMPULAN

Tujuan disusunnya publikasi ini adalah untuk memberikan gambaran ketenagakerjaan di Provinsi Papua pada tahun 2012. Berikut beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari publikasi ini:

i. **Penduduk Usia Kerja**

Penduduk usia kerja di Papua pada tahun 2012 mencapai 2.009.145 orang, dimana persentase penduduk usia kerja laki-laki lebih banyak daripada perempuan dan jumlah terbesar penduduk usia kerja terdapat pada kelompok usia 15-19 tahun yang mencapai 16,52 persen. Kegiatan utama yang paling banyak dilakukan penduduk usia kerja selama seminggu yang lalu adalah bekerja dengan persentase sebesar 76 persen.

ii. **Penduduk Angkatan Kerja**

Jumlah penduduk angkatan kerja di Papua pada tahun 2012 adalah 1.585.434 orang. Angkatan kerja paling banyak berada pada kelompok umur 30-34 tahun yang mencapai 17,7 persen. Tingkat pendidikan angkatan kerja di Papua masih tergolong rendah, dimana jumlahnya lebih dari separuh dari total angkatan kerja, bahkan 47,3 persennya berpendidikan tidak tamat SD.

iii. **Penduduk Bekerja**

Penduduk bekerja di Papua pada tahun 2012 ada sebanyak 1.527.933 orang atau setara dengan 76,05 persen dari total penduduk usia kerja. Jumlah terbanyak pekerja berada pada usia 30-34 tahun yang besarnya mencapai 274.828 orang atau sekitar 17,99 persen dari seluruh pekerja. Sementara itu, lebih dari 60 persen pekerja memiliki pendidikan SD ke bawah. Sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Papua.

iv. Pengangguran

Jumlah pengangguran di Provinsi Papua pada tahun 2012 sebanyak 57.501 orang atau sekitar 3,63 persen dari total angkatan kerja, dimana 59,20 persen adalah laki-laki dan sisanya 40,80 persen perempuan. Persentase pengangguran paling banyak berada pada kelompok usia 20-24 tahun. Sementara itu, lebih dari separuh penganggur adalah berpendidikan tinggi (SLTA ke atas). Menurut kegiatannya, pengangguran karena mencari pekerjaan mempunyai persentase paling besar yaitu sebesar 72,91 persen.

v. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Secara umum TPAK di Provinsi Papua tergolong tinggi, yaitu sebesar 78,91 persen. Tingkat partisipasi laki-laki lebih besar dibanding perempuan di semua kabupaten/kota.

vi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada tahun 2012, TPT Provinsi Papua adalah sebesar 3,63 persen. Kota Jayapura memiliki tingkat pengangguran paling tinggi di Papua, yaitu sebesar 12,70 persen. Sedangkan di beberapa kabupaten di pegunungan mempunyai TPT sebesar nol persen.

vii. Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Dibanding tahun 2011, kondisi ketenagakerjaan di Papua memperlihatkan adanya perbaikan. Tingkat pengangguran menurun, sementara TPAK mengalami peningkatan.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://papua.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA

Gedung PELNI Lantai 3, Jalan Argapura No : 15 Jayapura

Telepon : 0967-534519, 533028 (Hunting), Fax. 536490

Email : bps9400@bps.go.id. Homepage : papua.bps.go.id